

# Investasi Dukung Transisi Energi



## [SAJIAN UTAMA]

BPH Migas Tingkatkan Sinergi Awasi Distribusi BBM dan Gas Bumi

## [SAJIAN UTAMA]

Optimalisasi Jargas Melalui Pembaruan Regulasi

## [SOROT]

Target Terlampaui, BBM 1 Harga Lanjut Terus

# BBM 1 HARGA

untuk Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam rangka menegakkan asas keadilan, saat ini daerah terpencil pun sudah dapat menikmati harga BBM yang sama seperti di kota pada umumnya.



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  
[www.bphmigas.go.id](http://www.bphmigas.go.id)



# SAMBUTAN

## Ketersediaan Energi Adalah Keharusan

Filosofi *energy follow the people* yang merujuk pada pembangunan infrastruktur energi dilakukan di wilayah atau lokasi yang ditempati oleh orang banyak sudah sepatutnya ditinggalkan. Sebaliknya, filosofi *people follow the energy* harus dan memang sedang kita aktualisasikan.

Keberadaan infrastruktur energi memang sudah sebatasnya merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini. Itulah yang tercermin pada Program BBM 1 Harga. Sejak dimulai tahun 2017 lalu, semangat Program BBM 1 Harga tak sekadar menyamaratakan harga BBM di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di luar Jawa dengan di Jawa, melainkan juga menjamin ketersediaan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meski begitu, ketersediaan energi juga harus mengikuti kondisi terkini, baik dalam lingkup global dan maupun lokal. Dalam lingkup global, perubahan iklim mendapat perhatian serius dari banyak negara. Pemanfaatan energi hijau pun mengemuka lebih masif dan luas. Dalam lingkup lokal, Indonesia pun memiliki kandungan sumber energi beragam, termasuk energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

Inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia, transisi dari pemanfaatan energi berbasis fosil ke energi hijau. BPH Migas pun akan senantiasa mengawal ketersediaan energi di tanah air. Bagi kami, ketersediaan energi adalah keharusan, tak bisa ditawar lagi.

Namun, sinergi dengan seluruh stakeholder diperlukan untuk lebih mengoptimalkan ketersediaan energi di Indonesia. Mari kita melangkahkan kaki bersama, menggenggam tangan berdampingan, dan mewujudkan ketersediaan energi di negeri yang kita cintai ini bersama.

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan **Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.**

Kirimkan ke:

**Redaksional Buletin Hilir Migas**

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : [redaksi@bphmigas.go.id](mailto:redaksi@bphmigas.go.id)  
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656

## Redaksi

**Diterbitkan oleh**  
Badan Pengatur Hilir Minyak  
dan Gas Bumi

**Pembina**  
Kepala BPH Migas

**Pengarah**  
Komite BPH Migas

**Pimpinan Umum**  
Sekretaris BPH Migas  
Bambang Utoro

**Redaktur Ahli**  
Direktur BBM  
Patuan Alfon S

Direktur Gas Bumi  
Sentot Harijady BTP

**Pimpinan Redaksi**  
Koordinator Hukum dan Humas  
Ady Mulyawan R.

**Wakil Pimpinan Redaksi**  
Subkoordinator Humas  
Daman

**Redaksi Ahli**  
Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

**Redaksi**  
I Ketut Gede Aryawan, Idham Baridwan,  
Sekaryawan, Bukhori Muslim, Anwar  
Rofiq, Ayi Endan Harir,  
Julian Ambasadur S

**Editor**  
Ady Mulyawan R., Daman,  
Narcicy Makalew, Ade Mahendra,  
Josef G, Dian Puspitasari, Erna Sulastinah

**Peliputan**  
Ade Mahendra, Sugianto, Ajipamudji  
Awaludin, Imam Sofwan, Fitriá Roza,  
M. Gerardo

**Desain Grafis**  
Okto Berbudi, Yogi

**Dokumentasi**  
Ade Mahendra, Imam Sofyan, Ajipamudji  
Awaludin, M. Gerardo

**Sirkulasi**  
Erna Sulastinah, Imam Sofyan, Ajipamudji  
Awaludin, M. Gerardo

**e-mail**  
humas@bphmigas.go.id

**website**  
www.bphmigas.go.id

edisi 32 | 2021

# HILIR MIGAS



### [SAJIAN UTAMA]

#### Investasi Dukung Transisi Energi

6

Investasi subsektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia masih cukup prospektif. Pemerintah RI pun terus berupaya meningkatkan investasi migas karena vital yang dapat meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan transisi ke energi bersih.

### 6 [SAJIAN UTAMA]

Investasi Dukung Transisi Energi

9 BPH Migas Tingkatkan Sinergi  
Awasi Distribusi BBM dan Gas Bumi

12 [BERANDA]  
Optimalisasi Jargas Melalui Pembaruan  
Regulasi

14 Pertumbuhan Pipa Harus Disertai dengan  
Aliran Gas

16 [SOROT]  
Relaksasi Pastikan Kebutuhan  
BBM Tercukupi

19 Target Terlampaui, BBM 1 Harga  
Lanjut Terus

22 Tahun 2022, Kuota BBM Nasional Turun

24 Realisasi Distribusi BBM JBT & JBKP Tahun 2021,  
Cukup atau Over?

27 Optimalkan Layanan Publik Demi Pastikan  
Ketersediaan BBM Bagi Masyarakat

30 Premium Segera Dihapus?

33 Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan di  
Tangki BBM

### 36 [LENSA]

Akan Dibangun Jaringan Pipa Gas, Perwakilan  
BPH Migas Kunjungi JIPE di Gresik

Tingkatkan Kompetensi SDM Badan Usaha, BPH  
Migas Gelar Bimtek Bidang Gas Bumi

BPH Migas Pantau Kualitas Gas Bumi  
di 18 Titik Jawa Barat dan Jawa Timur

# CONTENTS



## 9 [SAJIAN UTAMA]

### BPH Migas Tingkatkan Sinergi Awasi Distribusi BBM dan Gas Bumi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) konsisten mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi agar tepat sasaran. Peningkatan sinergitas dengan sejumlah pihak dilakukan guna mengoptimalkan pengawasan BBM dan gas bumi.

Monitoring Fasilitas Pipa Gas Badan Usaha, BPH Migas Kunjungi Stasiun Metering Wunut Sidoarjo

Rancang Regulasi Nomor Registrasi Usaha (NRU) BBM, BPH Migas Gelar Public Hearing

Pastikan Stok BBM Aman Saat Nataru, Kepala BPH Migas Dampingi Menteri ESDM ke TBBM Padalarang

Apresiasi Stakeholder Hilir Migas, BPH Migas Gelar BPH Award 2021

Komite BPH Migas Resmikan BBM 1 Harga di Sejumlah Wilayah

BPH Migas-KAI Tingkatkan Koordinasi

BPH Migas Tindak Lanjut Usulan Alokasi BBM JBT Minyak Solar di Pelabuhan Kayangan

BPH Migas Raih Penghargaan JDHNN Terbaik IV



## 14

### [BERANDA] Pertumbuhan Pipa Harus Disertai dengan Aliran Gas

Dalam bauran energi nasional, pemanfaatan gas bumi ditargetkan sebesar 22% pada 2025 dan 24 % pada tahun 2050. Pemerintah RI sendiri terus mendorong peningkatan penyediaan energi yang mudah dan murah, seperti gas bumi. Terwujudnya upaya ini memerlukan infrastruktur gas bumi.

# Investasi Dukung Transisi Energi

Investasi subsektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia masih cukup prospektif. Pemerintah RI pun terus berupaya meningkatkan investasi migas karena vital yang dapat meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan transisi ke energi bersih.



## Kebijakan yang mendukung

Salah satu investasi yang bisa dikembangkan adalah pada jaringan gas rumah tangga atau jargas. Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan, untuk menarik minat investasi badan usaha dalam pengembangan infrastruktur jargas, BPH Migas memperbarui aturan terkait dengan penetapan harga gas bumi untuk pelanggan RT-2.

“Untuk rumah tangga tipe 2 sesuai regulasi lama itu kita batasi harganya yang sebelumnya hanya boleh dua kali dari harga tipe satu, tapi dengan regulasi baru kami memberikan fleksibilitas kepada Badan Usaha untuk mengusulkan kepada kami berapa sebetulnya harga keekonomian dari harga jual gas itu,” jelasnya belum lama ini.

Daya Tarik investasi memang diawali dari kebijakan yang mendukungnya. Selain jargas, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merevisi aturan main dalam pengembangan infrastuktur dan tata kelola gas bumi. Ke depan, Badan Usaha tidak perlu lagi melalui mekanisme lelang untuk mengembangkan infrastruktur di suatu wilayah.

Untuk kegiatan usaha niaga gas di wilayah yang belum masuk daftar lelang wilayah jaringan distribusi (WJD), Badan Usaha hanya perlu mendapat izin usaha niaga minyak dan gas bumi dari Menteri ESDM tidak lagi harus mengajukan lelang seperti yang ada pada aturan sebelumnya.

Pemerintah mengklaim aturan ini sebagai penyederhanaan birokrasi perizinan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 yang merupakan perubahan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Revisi dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan gas serta mempercepat pengembangan dan penyaluran gas kepada konsumen.

Salah satu perubahan dalam regulasi itu yakni terkait rekomendasi BPH Migas. Dalam Permen 4/2018, Badan Usaha harus memperoleh rekomendasi BPH Migas dan izin usaha niaga minyak dan gas bumi untuk menjalankan

usaha niaga gas di wilayah yang belum ada badan usaha pemegang WJD. Dalam regulasi baru, rekomendasi ini tidak lagi diperlukan.

Meski begitu, peran BPH Migas tetap ada, yakni pusat informasi dari setiap pengembangan infrastruktur gas bumi di suatu wilayah.

Dalam Pasal 14 ayat 10a dalam Permen 19/2021 menyebutkan, dalam hal belum terdapat badan usaha pemegang hak khusus WJD, kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa dapat dilakukan oleh badan usaha lain setelah mendapatkan izin usaha niaga minyak dan gas bumi dari Menteri ESDM, sepanjang wilayah yang dibangun belum masuk dalam penetapan rencana lelang WJD oleh BPH Migas pada tahun berjalan.

Perubahan lainnya terkait pengembangan infrastruktur gas di wilayah yang belum terdapat badan usaha pemegang hak khusus WJD. Dengan kondisi tersebut, sesuai Pasal 14 ayat 10b, badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas dapat melakukan pengembangan fasilitas dan menyalurkan gas ke konsumen baru setelah melakukan penyesuaian izin usaha niaga migas sampai dengan ditetapkannya badan usaha pemegang hak khusus WJD.

Sementara mengacu Pasal 14 ayat 10b Permen 4/2018, badan usaha hanya dapat

melakukan pengembangan fasilitas dan menyalurkan gas bumi kepada konsumen baru yang belum dilayani oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga migas lainnya. Ketentuan ini juga berlaku sampai dengan ditetapkannya badan usaha pemegang hak khusus WJD.

Sehingga, dengan adanya revisi Pasal 14 ayat 10b, maka badan usaha dapat mengajukan izin niaga migas untuk menasar baik pelanggan eksisting badan usaha lain maupun pelanggan baru.

Permen ESDM No. 19 Tahun 2021 bertujuan untuk mempercepat dan memberi kemudahan perizinan, serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para badan usaha. Tujuan lainnya yakni membuka peluang usaha infrastruktur gas bumi kepada badan usaha atau investor Namun di sisi lain, beleid ini juga untuk memberikan kehandalan pasokan konsumen gas bumi.

Dalam bisnis gas ini, pemerintah telah mengatur alokasi gas yang diberikan langsung kepada konsumen akhir atau badan usaha niaga yang menjual langsung kepada konsumen. Untuk pengaturan perizinan berusaha dan harga gas, BPH Migas berperan menetapkan hak khusus dan besaran toll fee atas ruas transmisi agar ada kepastian hukum dan berusaha bagi para badan usaha dan terpenuhinya hak-hak konsumen sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, BPH Migas berharap revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) dapat segera tuntas. Kehadiran rencana induk dibutuhkan sebab menjadi dasar pelaksanaan lelang ruas pipa transmisi dan wilayah jaringan distribusi.

Erika mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Migas kementerian ESDM guna membahas sejumlah isu termasuk revisi rencana induk.

"Kami ingin secepatnya tapi nanti tergantung hasil pembahasan," kata Erika di kesempatan berbeda.

Sebelumnya, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Agustus lalu, Erika mengungkapkan proses lelang belum dapat dilakukan pihaknya karena masih harus menanti penetapan revisi oleh Menteri ESDM.

"Pak Menteri juga menyampaikan supaya kami coba mendefinisikan kembali seperti apa sih WJD yang seharusnya. Artinya sudah terbuka (komunikasinya)," terang Erika.

Kehadiran revisi rencana induk ini juga nantinya berpotensi memberi kepastian untuk alokasi gas bagi pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang yang proyeknya tak kunjung terlaksana sejak 2006 silam. Dalam pemberitaan Kontan, Kementerian ESDM menargetkan revisi rencana induk dapat rampung pasca evaluasi neraca migas nasional dilakukan.

### Transisi ke energi bersih

Peningkatan investasi juga diperlukan untuk mendukung transisi energi. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada seluruh pelaku usaha di sektor minyak dan gas (migas) agar bersiap menghadapi proses transisi energi menuju energi hijau (green energy). Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkan



kerap menekankan agar seluruh pemangku kepentingan bersiap di era baru.

"Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain, pengembangan B30 hingga B100, pengembangan bioavtur yang terus dilakukan, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk sektor transportasi dan industri," ungkapnya dalam acara The 2nd IOG 2021, Selasa (30/11/2021).

Badan Usaha yang bersinggungan dengan energi fosil pun diminta untuk membuat perencanaan matang guna menghadapi era transisi tersebut.

"Oleh karena itu, kunci dari seluruh hal itu adalah bekerja maksimal dengan menggunakan teknologi hijau. Sehingga produk yang dihasilkan adalah yang ramah lingkungan, dan tentunya bisa mendukung capaian pengurangan emisi karbon," tutur Menko Airlangga.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha. Ia mengatakan, Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan energi bersih.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menggenjot pemanfaatan energi bersih harus beriringan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi migas nasional,

sehingga Indonesia tidak ketergantungan terhadap impor crude.

Indonesia diproyeksi masih akan membutuhkan minyak dan gas bumi (migas) hingga 2050, meski di saat yang bersamaan pemerintah terus melakukan transisi energi bersih. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) seperti ditetapkan dalam Perpres Nomor 22/2017 memproyeksikan konsumsi minyak dan gas Indonesia pada 2050 mencapai 8,69 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

Kendati RUEN menetapkan porsi minyak dalam bauran energi Indonesia menurun dari paling banyak 25 persen pada 2025 menjadi paling banyak 20 persen di 2050, secara volume konsumsi minyak Indonesia meningkat sekitar 111 persen dari 2,19 juta BOPD pada 2025 menjadi 4,62 juta BOPD di 2050. Sementara itu, RUEN menetapkan porsi gas dalam bauran energi Indonesia meningkat dari 22,4 persen pada 2025 menjadi 24 persen di 2050. Volume konsumsi gas diproyeksikan meningkat sekitar 171 persen dari 1,76 juta BOEPD pada 2025 menjadi 4,79 juta BOEPD di 2050.

Artinya, sumber energi migas atau berbasis fosil sampai saat ini masih dibutuhkan. Dengan kata lain, transisi energi tak dilakukan secara serentak, namun bertahap dan berkelanjutan. ★

# BPH Migas Tingkatkan Sinergi Awasi Distribusi BBM dan Gas Bumi



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) konsisten mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi agar tepat sasaran. Peningkatan sinergitas dengan sejumlah pihak dilakukan guna mengoptimalkan pengawasan BBM dan gas bumi.

Salah satu peningkatan sinergitas tersebut terlihat saat BPH Migas dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Pengamanan, Pencegahan, dan Penegakan Hukum di Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, Selasa (09/11/2021) di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri) Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam rangka bantuan pengamanan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang BBM dan Gas Bumi serta untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara BPH Migas dengan Polri guna kelancaran penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama tiga tahun.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1.PJ/05/MEM/2019 dan Nomor: B/3/I/2019 pada tanggal 10 Januari 2019 tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pernyataan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, dan Kapolri tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM dan Kapolri.

Terdapat empat ruang lingkup utama dalam perjanjian kerja sama ini, yaitu

1. Pertukaran data dan/atau informasi
2. Bantuan pengamanan
3. Pencegahan gangguan di bidang BBM dan gas bumi
4. Penegakan hukum

“Semoga dengan terselenggaranya kerja sama ini, sinergitas BPH Migas dan POLRI dapat terlaksana dengan baik dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan di

bidang BBM dan gas bumi di lapangan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Erika.

### Sosialisasi ke masyarakat luas

Sinergitas antara BPH Migas dan Polri juga mencakup sosialisasi kepada jajaran Kepolisian di daerah-daerah. Sosialisasi bertujuan agar Kepolisian di daerah memiliki satu pemahaman terkait bantuan pengamanan, pencegahan, dan penegakan hukum di bidang BBM dan gas bumi. Terhitung, sudah beberapa kali sosialisasi tersebut diadakan, seperti di Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/11/2021).

Wakapolda Sumatera Utara Brigjen. Pol. Dadang Hartanto dalam kesempatan ini menyampaikan, agar seluruh jajaran Polda mengomunikasikan dengan baik pengawasan BBM dan gas bumi yang bersubsidi, dan jangan sampai seperti ‘pagar makan tanaman’, khususnya bagi para Kabag Ops dan Kasat Reskrim di wilayah kerjanya masing-masing.

“Terapkan konsep riil dan capaian ke depan, laporkan ke para Kapolres, untuk agenda sebagai analisis dan evaluasi,” ungkap Dadang.

Sosialisasi ini diharapkan dapat menanggulangi pelanggaran di bidang hilir migas, seperti jika terdapat info kelangkaan BBM, Kepolisian dapat langsung menghubungi rekan-rekan di BPH Migas maupun sebaliknya. Sehingga kelancaran penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi di tanah air, khususnya di wilayah Sumatera Utara dapat terwujud.

Pada kesempatan sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dalam sambutannya menyampaikan pengawasan dan penegakan hukum di hilir migas sangat penting. Saat ini, konsumsi JBT terus meningkat dan potensi terjadinya overkuota baik untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak solar maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium juga semakin besar sehingga diperlukan pengendalian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

“Kondisi penyaluran dan pendistribusian BBM dapat dibantu diawasi oleh seluruh

stakeholders di daerah, utamanya Polri yang tugasnya melindungi dan mengayomi, Kami berharap ke depannya dukungan dari bapak/ibu dan berbagai pihak yang berkepentingan ini ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi di seluruh wilayah NKRI akan berjalan dengan baik,” ujar Harya.

Kegiatan serupa yang disertai workshop juga diadakan di sejumlah wilayah lain, seperti Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (18/11/2021) dan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/11/2021).

Sosialisasi yang digelar tak hanya menggandeng Polri. Beberapa kali, BPH Migas juga melakukan sosialisasi bersama Anggota Komisi VII DPR RI, seperti di Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (05/11/2021); Gunungkidul, Yogyakarta, Sabtu (06/11/2021); Bone, Sulawesi Selatan, Jumat (12/11/2021); dan Banjarnegara, Jawa Tengah (13/11/2021).

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, disampaikan informasi mengenai tugas, fungsi serta capaian kinerja BPH Migas hingga tahun 2021. Di Banjarnegara, misalnya, Anggota Komisi VII DPR RI mengenalkan BPH Migas kepada masyarakat yang berperan penting untuk merealisasikan program strategis nasional BBM 1 harga.

Selain itu, disampaikan kembali oleh Komite BPH Migas mengenai penyelesaian masalah kelangkaan solar subsidi di lapangan, yaitu terkait penerbitan surat relaksasi distribusi solar subsidi. Tak hanya itu, sosialisasi ini digelar guna menampung aspirasi masyarakat.

Penyalahgunaan berpotensi menimbulkan kelangkaan BBM

Dalam pengawasan, BPH Migas membuat surat edaran peruntukan BBM bersubsidi kepada lembaga penyalur untuk dipatuhi dan mendorong digitalisasi SPBU sebagai salah satu sarana monitoring yang dilakukan oleh Pertamina.

Peruntukan Solar bersubsidi hanya untuk transportasi darat berupa kendaraan pribadi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(TNKB) berwarna hitam dengan tulisan putih, kendaraan TNKB berwarna kuning dengan tulisan hitam (kecuali mobil barang pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam), ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, transportasi air dengan surat rekomendasi dari SKPD terkait.

Kemudian, sarana transportasi laut kapal berbendera Indonesia dan sarana angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia, pelra/perintis, sektor kereta api melalui penetapan kuota dari Badan Pengatur, usaha pertanian, usaha mikro, usaha perikanan serta pelayanan umum berupa krematorium, tempat ibadah, panti jompo, panti asuhan, rumah sakit tipe C dan D dengan surat rekomendasi dari SKPD terkait.

"Dalam melakukan pengawasan di lapangan, BPH Migas bekerja sama dengan TNI dan POLRI, kami mengucapkan terima kasih kepada aparat yang membantu penindakan penyalahgunaan solar yang juga menjadi salah satu faktor berkurangnya Solar untuk masyarakat yang membutuhkan," terang Erika di kesempatan berbeda.

Jadi, sinergi yang terjalin tak hanya dengan Polri. BPH Migas juga menjalin sinergi dengan stakeholder lain, seperti TNI dan Badan Usaha dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero). Sinergitas dengan melibatkan makin banyak pihak penting mengingat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) BPH Migas itu sendiri.

Di samping itu, sinergitas yang solid diperlukan untuk mendeteksi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Baru-baru ini, contohnya, terbongkar aksi penimbunan ilegal atas Solar bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus penyimpangan BBM bersubsidi ini terwujud atas kerja sama antara Pertamina dan Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korpolarirud Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri. Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan kasus serupa sebelumnya di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah.



Pjs Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana karena sangat merugikan negara.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut juga menyengsarakan masyarakat karena berpotensi menimbulkan kelangkaan karena volume penyaluran BBM bersubsidi telah dipagu oleh kuota dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, sasaran pengguna BBM bersubsidi telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Selain itu, BPH Migas juga mengatur pengendalian BBM bersubsidi melalui SK BPH

Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

Peran masyarakat terhadap pengawasan distribusi BBM bersubsidi pun tak bisa dipinggirkan begitu saja. Laporan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa menjadi awal pengungkapan suatu kasus, seperti yang terjadi di Dumai, Riau medio Oktober lalu.

Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini bermula keluhan masyarakat soal kelangkaan BBM jenis solar. Ternyata benar, BBM jenis Solar bersubsidi disalahgunakan untuk kepentingan industri oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. ★

# Optimalisasi Jaringan Gas Melalui Pembaruan Regulasi



**K**epala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan dalam penetapan harga gas untuk pelanggan rumah tangga, Pemerintah membagi pelanggan rumah tangga dalam dua kriteria, yakni rumah tangga 1 (RT-1) yang meliputi rumah susun, rumah sederhana, rumah sangat sederhana. Sementara kriteria rumah tangga 2 (RT-2) meliputi rumah menengah, rumah mewah, apartemen.

## Tetap memberi batasan

"Untuk rumah tangga tipe 2 sesuai regulasi lama itu kita batasi harganya yang

sebelumnya hanya boleh dua kali dari harga tipe 1, tapi dengan regulasi baru kami memberikan fleksibilitas kepada Badan Usaha untuk mengusulkan kepada kami berapa sebetulnya harga keekonomian dari harga jual gas itu," katanya di Jakarta, Selasa (21/09/2021).

Kendati demikian, Erika mengatakan Pemerintah tetap memberikan batasan agar pemakaian gas bumi melalui jaringan gas masih bisa bersaing dengan penggunaan liquefied petroleum gas (LPG). Selain itu, dalam menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, BPH Migas turut mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat dan kepentingan Badan Usaha.

"Contohnya misalkan kalau dibandingkan dengan LPG 12 kg misalnya masih lebih murah LPG 12 kg, tentu masyarakat tidak akan mau jadi tentu ada batasannya. Kami memberikan fleksibilitas kepada badan usaha, mudah-mudahan itu bisa menarik minat dari pada badan usaha untuk berinvestasi," ungkapnya.

Kini, kenaikan harga gas pipa dialami sejumlah

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperbarui aturan terkait dengan penetapan harga gas bumi untuk pelanggan kecil. Tujuannya untuk menarik minat investasi Badan Usaha dalam pengembangan infrastruktur jaringan gas (jargas) rumah tangga.

kelompok pelanggan masyarakat di beberapa wilayah. Ini setelah terbit Peraturan BPH Migas yang mengatur soal kenaikan harga gas pipa tersebut.

Beleid ini memperbarui harga gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil pada jaringan pipa distribusi sejumlah wilayah, seperti Batam, Cilegon, Tangerang, DKI Jakarta, Bogor, Surabaya, Majalengka dan Gresik.

Secara umum besaran kenaikan yang dikenakan hampir sama yakni untuk RT-1 terdiri dari rumah susun, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan sejenisnya dengan harga Rp4.250 per meter kubik.

Lalu, harga gas untuk RT-2 terdiri dari rumah menengah, rumah mewah, apartemen di kisaran Rp6.000 hingga Rp6.250 per meter kubik.

Adapun harga gas untuk Pelanggan Kecil 1 (PK-1) terdiri dari rumah sakit pemerintah, puskesmas, panti asuhan, tempat ibadah, lembaga pendidikan pemerintah, lembaga keagamaan, kantor pemerintah, lembaga

sosial, usaha mikro, dan sejenisnya masih tetap Rp4.250 per meter kubik.

Lalu untuk harga gas untuk Pelanggan Kecil 2 (PK-2) terdiri dari hotel, restoran atau rumah makan, rumah sakit swasta, perkantoran swasta, lembaga pendidikan swasta, pertokoan/rumah toko/rumah kantor/pasar/mall/ swalayan, dan kegiatan komersial sejenisnya masih Rp6.000 per meter kubik.

Mendengar aspirasi dari berbagai pihak Sebelum menetapkan harga jargas, BPH Migas senantiasa mendengar aspirasi dari berbagai pihak. Pada pertengahan tahun 2021, misalnya, BPH Migas telah menetapkan harga jual gas bumi untuk 11 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021. Dalam penetapan harga tersebut, BPH Migas merangkul beberapa instansi dan elemen terkait, seperti perwakilan pemerintah daerah/kota, Ditjen Migas, Badan Usaha, Yayasan Lembaga Konsumen Nasional (YLKI), dan awak media.

Kemudian, BPH Migas juga telah melakukan survei lapangan dan melakukan evaluasi atas usulan harga gas bumi untuk menetapkan harga jual gas bumi. Barulah Peraturan BPH Migas Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 Tahun 2021, tanggal, 4 Juni 2021 ditetapkan.

Kesebelas kabupaten/kota yang telah mendapat penetapan harga jual gas bumi dari BPH Migas, masing-masing adalah, Kota Batam, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo.

Selain aspirasi, dukungan lain dari berbagai pihak juga diperlukan agar pembangunan jargas makin masif dan luas. Pasalnya, Pemerintah telah menargetkan empat juta sambungan rumah (SR) jargas hingga tahun 2024.

Dukungan konkret, misalnya, dapat dilihat dari Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz mengatakan perusahaan terus melakukan optimalisasi rantai pasok dalam akselerasi pembangunan jargas melalui

jaringan pipa gas dengan menggunakan LNG dan receiving terminal agar bisa menjangkau sejumlah wilayah yang tidak memiliki jaringan pipa gas.

"Kemudian kita juga melakukan distribusi dengan kereta api misalnya ataupun dengan LNG by tracking di titik serah terima, baru dilakukan proses regasifikasi," ujar Haryo dalam public expose di Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Tak hanya itu, lanjut Faris, PGN juga akan terus menyalurkan gas bumi dengan pemanfaatan moda gas bumi nonpipa dalam bentuk compressed natural gas (CNG) dengan melakukan pengembangan infrastruktur dan memanfaatkan SPBG serta mobile refueling unit yang kemudian didistribusikan dengan CNG tracking atau melalui Gas Transport Module (GTM) ke lokasi pelanggan.

Faris menilai pengembangan jargas juga tentu dukungan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan BPH Migas melalui

penetapan harga jual gas yang sesuai dengan keekonomian bagi PGN.

"Proyek (jargas) ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingginya impor elpiji. Proyek ini akan dibiayai pemerintah melalui APBN 2021 sebesar 120 ribu sambungan rumah tangga dan dengan lingkup pekerjaan PGN adalah sebagai asisten dan pembangunan jargas tersebut," ucap Faris.

Selain itu, ungkap Faris, PGN saat ini juga sedang membangun 50 ribu sambungan rumah tangga atau jargas mandiri di wilayah Jakarta dan Tangerang yang berasal dari dana perusahaan.

"PGN juga terus berupaya untuk meningkatkan pengembangan jarga rumah tangga dengan memanfaatkan aplikasi digital jaringan pipa PGN untuk penetrasi pasar. PGN juga terus melakukan terobosan untuk memudahkan proses penanganan melalui digitalisasi," kata Faris. ★



# Pertumbuhan Pipa Harus Disertai dengan Aliran Gas

Dalam bauran energi nasional, pemanfaatan gas bumi ditargetkan sebesar 22% pada 2025 dan 24 % pada tahun 2050. Pemerintah RI sendiri terus mendorong peningkatan penyediaan energi yang mudah dan murah, seperti gas bumi. Terwujudnya upaya ini memerlukan infrastruktur gas bumi.

Infrastruktur gas bumi adalah faktor yang menentukan dalam usaha penyediaan energi yang mudah dan murah, khususnya energi bersih seperti gas bumi. Terkait dengan hal tersebut, BPH Migas melakukan pemantauan terhadap pembangunan infrastruktur pipa gas bumi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.

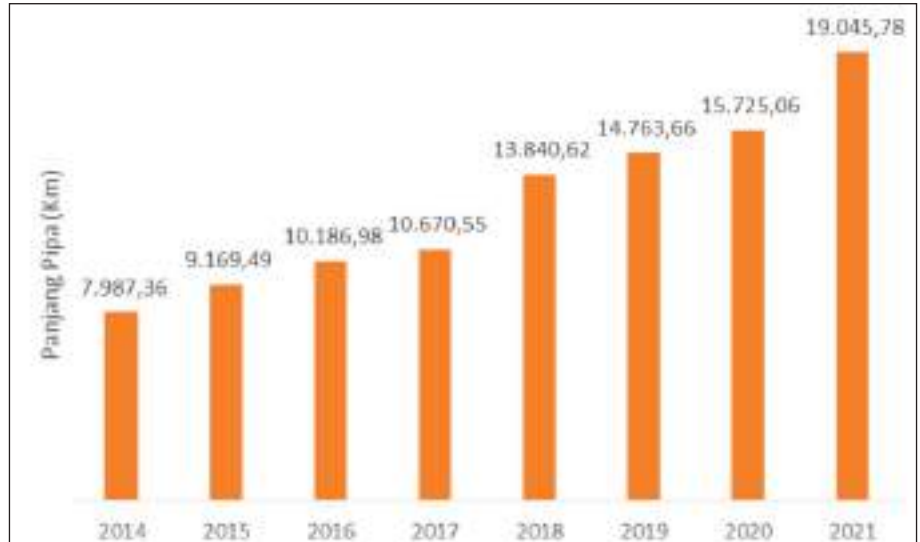
## Terus bertambah

Infrastruktur gas bumi di tanah air terus bertambah. Pada periode semester II tahun 2021, terdapat penambahan panjang pipa distribusi sepanjang 56,01 km dan pipa jargas sepanjang 3.263,70 km sehingga total tambahan panjang pipa gas bumi pada tahun 2021 sepanjang 3.320,72 km. Jumlah kumulatif panjang pipa gas bumi (pipa transmisi, pipa distribusi, dan pipa jargas) sampai saat ini sepanjang 19.045,78 km.

Infrastruktur pipa gas bumi semakin bertambah secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan gas bumi sebagai bahan baku maupun bahan bakar juga semakin meningkat.

## Berharap cepat teraliri

Tapi, pertumbuhannya panjang pipa gas bumi tak akan berarti bila tak disertai dengan gas



Grafik Akumulasi Panjang Pipa Gas Bumi Tahun 2014–2021

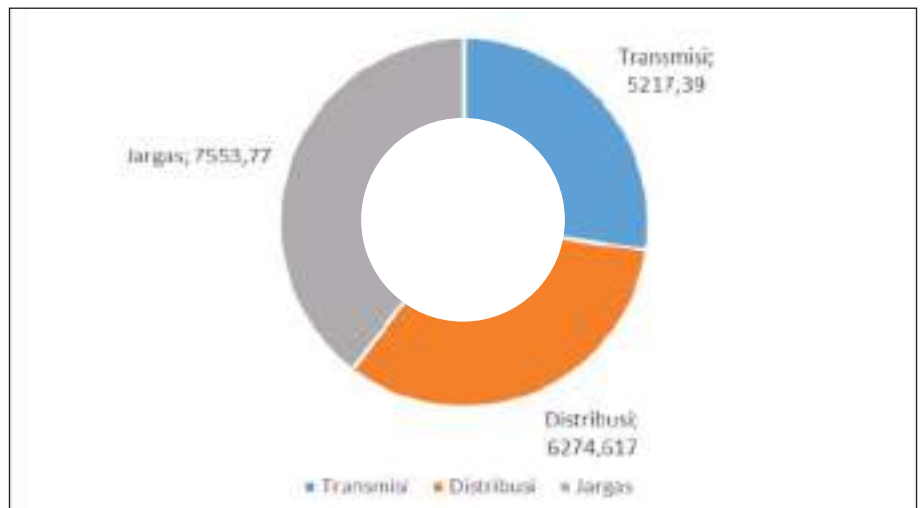


Diagram Kumulatif Panjang Pipa Gas Bumi Perjenis Pipa

yang mengalirinya. Salah satu contohnya adalah pipa transmisi Gresik-Semarang (Gresem). Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, pihaknya melihat bahwa onshore receiving facility (ORF) milik PT Pertamina Gas (Pertagas) di

Tambak Rejo, Surabaya, Jawa Timur sudah commissioning. Fasilitas ORF milik Pertagas itu siap menantikan kucuran gas mengalir dari pipa transmisi Gresik-Semarang.

“ORF PT Pertamina Gas di Tambak Rejo saat ini sudah commissioning dan menunggu gas

mengalir dari pipa transmisi Gresem. ORF ini akan menjadi titik salur ke berbagai konsumen industri, listrik (Tambak Lorok), dan jargas,” kata Saleh di Jakarta, Senin (01/11/2021).

Saleh menuturkan lebih lanjut, pipa gas Gresik-Semarang merupakan pipa gas open access dengan panjang 268 kilometer dan diameter 28 inci. Kapasitas pengaliran gas maksimal 400 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).

“Kita harapkan secepatnya mengalir gasnya karena fasilitas ini sudah siap beroperasi, tinggal menunggu penyaluran gas dari pipa transmisi Gresik-Semarang,” tambahnya.

Selain kebutuhan Jargas Lamongan dan Bojonegoro di Jawa Timur, pipa Gresem juga

menjadi salah satu infrastruktur penghubung untuk dilakukannya commissioning fasilitas treatment dan produksi lapangan Jambaran Tiung Biru.

Di mana, gas akan dipasok oleh PT PGN Tbk dari Lapangan Gas Kepodang yang mengalir melalui pipa gas bumi ruas Kepodang-Tambak Lorok dan masuk pipa gas bumi ruas Gresik-Semarang.

Pembangunan infrastruktur gas sangat dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan gas dengan maksimal. Namun, tentunya infrastruktur gas memerlukan dukungan untuk investasi.

Direktur Eksekutif Refomainer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, 85

cadangan dan produksi gas bumi ada di Indonesia Timur, sedangkan 85% penggunaannya ada di Indonesia bagian barat.

“Mau tidak mau infrastruktur jadi kunci,” kata Komaidi beberapa waktu lalu.

Pemerintah pun mendarai hal ini. Kini, tercatat sekitar 53 proyek infrastruktur gas di Indonesia timur, mulai dari pembangunan mini regas, pipa transmisi, unit penyimpanan hingga kilang. Potensi cadangan gas nasional sendiri diperkirakan mencapai 62,4 triliun kaki kubik (tcf) dengan cadangan terbukti 43,6 tcf yang dapat diproduksi selama kira-kira 20 tahun ke depan. ★



# Relaksasi

## Pastikan Kebutuhan BBM Tercukupi

Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) bertindak cepat memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) tercukupi akibat perubahan pola konsumsi BBM, khususnya Solar bersubsidi. Relaksasi pengaturan distribusi BBM menjadi salah satu langkah untuk memastikan kebutuhan BBM tercukupi.

Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, BPH Migas mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan agar ketersediaan BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI. Dalam pengaturan ketersediaan dan distribusi BBM, BPH Migas menetapkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT), yaitu Solar bersubsidi dan Minyak Tanah dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yaitu Premium untuk setiap kabupaten/kota agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat volume kepada masyarakat yang berhak menerima.

Ada sejumlah ketentuan jenis kendaraan apa saja yang bisa mengonsumsi BBM bersubsidi, seperti ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, usaha pertanian, usaha mikro, usaha perikanan dan sebagainya.

Peningkatan konsumsi BBM bersubsidi BPH Migas pun memantau distribusi BBM bersubsidi agar tak melampaui kuota yang telah ditetapkan. Namun, ada kalanya terjadi dinamika di lapangan, misalnya perubahan pola konsumsi masyarakat.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi dengan Badan Usaha penerima penugasan penyaluran JBT/Minyak Solar, yaitu PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo TBK di kantor BPH Migas, Selasa, (19/10/21).

Pada rapat koordinasi tersebut, Pertamina menjelaskan adanya peningkatan konsumsi BBM khususnya Solar bersubsidi yang sejalan dengan naiknya kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat di beberapa wilayah sebagai dampak dari keberhasilan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah dan diturunkannya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pertamina mencatat peningkatan konsumsi di gasoil didominasi oleh Solar bersubsidi di mana konsumsi pada Semester I 2021 tercatat sebesar 37.813 kiloliter/bulan dan terus meningkat hingga mencapai 44.439 kiloliter pada bulan September atau naik sekitar 17%.

"Sedangkan di sektor gasoline, peningkatan mencolok terjadi di produk Pertamina, dimana pada periode Semester I 2021 rerata bulanan sebesar 12.586 kiloliter dan terus merangkak

naik hingga mencapai kenaikan 49% di bulan September sebesar 18.840 Kiloliter," kata Pjs Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman.

Namun, dia menegaskan, saat ini stok BBM Pertamina dalam kondisi cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap dihimbau membeli BBM sesuai kebutuhan.

"Stok untuk produk yang meningkat signifikan yaitu Solar mencapai 17 hari dan Pertamina mencapai 18 hari. Pengiriman dari Terminal BBM juga terus dilakukan setiap hari ke seluruh SPBU dan Kilang juga terus berproduksi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," jelas Fajriyah.

Khusus untuk Solar, Pertamina telah melakukan penambahan volume penyaluran ke beberapa wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan seperti Sumatera Barat sebesar 10%, Riau 15%, dan Sumatera Utara 3.5%.

"Mengingat Solar adalah BBM bersubsidi, kami sangat cermat dalam melakukan



penambahan penyaluran agar bisa tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum-oknum tertentu,” tegas Fajriyah.

Di tempat terpisah, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan tak menampik bahwa terjadinya kelangkaan BBM sebenarnya pertanda membaiknya kondisi ekonomi pasca kebijakan PPKM yang menyebabkan naiknya permintaan.

“Patut disyukuri bahwa saat ini roda perekonomian kembali tumbuh setelah cukup lama dilakukan pembatasan oleh Pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya permintaan Solar bersubsidi yang cukup signifikan, sedangkan di sisi lain Solar bersubsidi itu dibatasi oleh kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas,” ujarnya. Penyebab lainnya, tambahnya, terjadinya kenaikan harga CPO (minyak sawit mentah) sepanjang 2021 bisa menjadi penyebab

ketersediaan stok BBM subsidi terganggu, karena BBM solar subsidi merupakan program solar B30.

“Kenaikan harga CPO yang melejit sampai 75% jika dibandingkan tahun 2020 ikut mendorong kenaikan harga FAME sebagai bahan campuran B30 ini. Jadi, Pemerintah harus membuat regulasi harga atau DMO CPO untuk program biodiesel sehingga tidak menambah beban produksi bagi Pertamina jika harga FAME sedang mengalami kenaikan,” ujarnya.

Dia pun mengusulkan saat harga FAME mengalami kenaikan, maka Pertamina bisa diberikan kelonggaran untuk menjual BBM solar subsidi murni tanpa di campur dengan FAME. Jika nanti harga FAME sudah turun, maka Pertamina wajib kembali menjual BBM solar subsidi B30 ke masyarakat.

### Penyesuaian kuota

BPH Migas pun merespon cepat indikasi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi ini melalui langkah-langkah evaluasi dan monitoring terhadap pengaturan kuota Solar bersubsidi. Evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan Pertamina dan AKR sebagai pelaksana di lapangan dan juga pemerintah daerah.

“Dengan perubahan pola konsumsi tersebut, BPH Migas, segera melakukan langkah-langkah dengan mengevaluasi pengaturan kuota solar bersubsidi. Dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk kebutuhan masyarakat, kami telah menerbitkan surat relaksasi distribusi Solar bersubsidi, yaitu memberikan kewenangan pengaturan kuota lebih lanjut kepada PT Pertamina Patra Niaga dengan penyesuaian

kuota untuk wilayah/sektor pengguna yang under dan over kuota sepanjang tidak melebihi kuota nasional 15,8 juta kiloliter (kl). Tentu saja pelaksanaan relaksasi ini tetap diawasi oleh BPH Migas," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Dengan kata lain, ia menambahkan, pihaknya memberikan kewenangan kepada Pertamina Patra Niaga untuk melakukan penyesuaian kuota asal tidak melebihi kuota nasional 15,8 juta kl.

Melalui relaksasi ini, Erika menegaskan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan BBM hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kuota Solar bersubsidi

sebanyak 15,8 juta kl mencukupi untuk kebutuhan masyarakat tahun ini, meski sempat terjadi lonjakan permintaan.

Tak hanya relaksasi, BPH Migas juga terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui dengan pasti kondisi terkini. Peninjauan dilakukan ke beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Jawa, seperti di Sumatera Utara, Jambi hingga beberapa daerah di Jawa.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, pihaknya baru saja meninjau Medan, Palembang, dan juga Bangka Belitung. Menurutnya, jika ditemui kelangkaan, maka BPH Migas akan melakukan penghitungan. Mengenai stok Solar, Saleh menyebutkan, saat ini masih aman.

"Ketika jumpai kelangkaan ini, kami hitung kelangkaan dari kriteria ini, Solar ini kan barang subsidi, sudah dipatok 15,8 juta kl untuk 2021," ungkapnya.

"Kondisi yang kita dapatkan menurut saya bahwa kondisi kelangkaan ini bersifat (sementara), pasca relaksasi, pasca Pertamina diberikan penyesuaian, akan lebih baik ke depan," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah bersama Pertamina dan BPH Migas ke depan perlu memikirkan cara penguatan sistem audit BBM, misalnya memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozzle digital di SPBU, bukan direkap di depo BBM berbasis DO. ★





# Target Terlampaui, BBM 1 Harga

## Lanjut Terus

Capaian Program BBM 1 Harga Tahun 2021 yang sudah beroperasi menjadi 78 Penyalur atau melebihi target tahun 2021 yang sebanyak 76 Penyalur. Tahun sebelumnya, Program BBM 1 Harga juga mencapai target dengan terbangunnya 83 Penyalur. Meski mencapai dan bahkan melampaui target, Program BBM 1 Harga akan tetap dilanjutkan.

**K**ebijakan BBM 1 Harga merupakan program Pemerintah agar masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di luar Jawa dapat menikmati harga BBM yang sama dengan di Pulau Jawa sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud serta dapat memberikan multiplier effects terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

### Konsisten mengawal sejak tahun 2017

Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) pun akan

terus mengawal pelaksanaan Program BBM 1 Harga yang dilaksanakan di wilayah-wilayah 3T ke depannya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati di sela Peresmian Secara Serentak Tujuh Penyalur BBM 1 Harga yang dipusatkan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/12/2021).

Erika mengatakan, berdasarkan Roadmap Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga, sampai dengan akhir tahun 2024, yaitu terbangunnya 583 penyalur



BBM 1 Harga. BPH Migas secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM 1 Harga agar target tersebut dapat tercapai.

“Sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, capaian program BBM 1 Harga sebanyak 253 Penyalur. Adapun target Tahun 2021 adalah 76 Penyalur, dengan capaian pembangunan sebanyak 78 Penyalur,” lanjut Erika.

Erika berharap, dengan beroperasinya Penyalur BBM 1 Harga ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya untuk masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan untuk seluruh wilayah NKRI pada umumnya.

Sebaran penyalur BBM 1 Harga yang diresmikan pada kesempatan kali ini ialah SPBU di Kecamatan Kobalima, Kecamatan Laen Manen, Kecamatan Sasitamean,

Kecamatan Malaka Barat (Kabupaten Malaka), Kecamatan Wewewa Tengah (Kabupaten Sumba Barat Daya) serta dua Penyalur di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Kecamatan Hu'u (Kabupaten Dompu) dan Kecamatan Moyo Utara (Kabupaten Sumbawa).

Sesuai amanat dalam Perundang-undangan, BPH Migas mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah NKRI, Pemerintah saat ini melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 telah mengamanatkan kepada BPH Migas untuk mengawal pelaksanaan Program BBM 1 Harga melalui penugasan terhadap Badan Usaha Penerima Penugasan untuk melaksanakan

pembangunan penyalur BBM 1 Harga pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan,” kata Komite BPH Migas Harya Adityawarman di kesempatan berbeda.

#### Berat dan berliku

Kebijakan BBM 1 Harga bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Pahalanya, BBM 1 Harga membuat biaya transportasi akan lebih murah. Begitu pula dengan biaya logistik akan lebih murah sehingga harga juga akan bisa diturunkan.

Namun, untuk membangun dan menyiapkan lembaga penyalur BBM 1 Harga, bukan pekerjaan mudah. Butuh kerja sama dan sinergi berbagai pihak, mulai PT Pertamina (Persero), pemerintah daerah (pemda), dunia usaha serta lainnya.



Kerja sama solid diperlukan karena proses distribusi BBM 1 Harga berat dan berliku. Setelah SPBU terbangun dan siap beroperasi, masih butuh perjuangan yang tidak ringan. Pertamina harus memasok BBM ke lembaga penyalur BBM agar bisa disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mendistribusikan BBM ke Papua, misalnya, terlebih di daerah Wamena, Jayawijaya, dan lainnya butuh biaya Rp11.000/liter. Biaya serupa juga terjadi untuk distribusi di daerah pelosok lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lainnya. Sementara, satu liter Premium hanya dijual Rp6.540/liter dan Solar lebih murah lagi.

Dalam konteks Papua, selama ini, depo-depo BBM Pertamina adanya di beberapa kota besar, seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, dan Merauke. Sementara itu, untuk mendistribusikan BBM sampai pedalaman,

dibutuhkan berbagai moda transportasi yang harus berganti-ganti, dari kapal ke truk, tongkang bahkan perahu anggota Pelra.

Artinya, butuh proses dan perjalanan panjang dan mahal. BBM dari Kilang Kasim atau dari Balikpapan dikirim ke Jayapura diangkut kapal tangker. Kemudian, dilanjutkan dengan truk tangki ke titik tertentu, baik di SPBU atau bandara terdekat, sebelum diangkut dengan pesawat terbang. Untuk sampai ke Wamena, Jayawijaya, Ilaga dan lainnya, BBM harus diangkut dengan pesawat terbang. Sekali angkut BBM, satu pesawat memiliki keterbatasan kapasitas.

Di sini butuh perjuangan ekstra keras dan komitmen tinggi. Butuh semangat dan jiwa nasionalisme tinggi karena bukan semata-mata mengejar keuntungan. Namun, pelayanan dan pemerataan kepada saudara sebangsa, terlebih di daerah 3T.

### Meringankan beban masyarakat

Perjuangan berat nan berliku dalam mendistribusikan BBM 1 Harga setimpal dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi Penyalur BBM 1 Harga. Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, BBM 1 Harga salah satu manfaatnya dapat mendorong konsumsi di daerah.

“Meski tidak signifikan, BBM 1 Harga berkontribusi mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Menaikkan daya beli konsumen setempat,” ujarnya belum lama ini.

Manfaat lain dari kehadiran BBM 1 Harga di wilayah-wilayah 3T adalah membuka lapangan kerja baru, seperti operator SPBU. Jika diakumulasi, ribuan orang terserap kerja dan implikasinya ikut mendongkrak nasib dan kesejahteraan mereka. Selain itu, peluang usaha baru terbuka sejalan dengan hadirnya BBM dengan murah dibandingkan sebelumnya.

Pada kesempatan lain, pengamat keuangan Ariston Tjendra mengutarakan, sebelum ada

BBM 1 Harga, harga BBM di daerah pelosok bisa melonjak sangat tinggi.

“Dulu di daerah tertentu, di antaranya Maluku dan Papua, harga BBM Premium bisa Rp40 ribu sampai Rp100 ribu per liter. Jadi, Program BBM 1 Harga ini sangat membantu perekonomian daerah setempat, bisa menurunkan biaya-biaya dan akhirnya meningkatkan demand atau konsumsi,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja sama BPH Migas dan pemerintah kabupaten yang berhasil menghadirkan Penyalur BBM 1 Harga untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan mengakselerasi perputaran siklus perekonomian.

Dikatanya, BBM 1 Harga membantu seluruh lapisan masyarakat kecil nelayan dan petani, serta pelaku usaha kecil atau UMKM, yakni keadilan akses energi, secara khusus di wilayah pinggiran atau daerah 3T.

Ia juga mengatakan, keberhasilan terbangunnya Penyalur BBM 1 Harga ini hendaknya tidak selesai sampai di masa pembangunan saja. Namun, diharapkan terus berlanjut pada kerja sama pengawasan operasional bersama-sama BPH Migas, pemerintah daerah, Kepolisian, Pertamina dan masyarakat agar BBM 1 Harga dapat tepat sasaran dan tepat volume serta tidak disalahgunakan.

Manfaat kehadiran BBM 1 Harga juga diakui oleh Awaluddin (52), warga Desa Kambojang, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ia mengaku bersyukur Program BBM 1 Harga ini berjalan baik. Ia bercerita, biasanya ia membeli BBM di tengkulak dengan harga hampir dua kali lipat dari saat setelah BBM 1 Harga hadir di Pulau Maya.

“Biasanya, beli ke tengkulak Rp10.000/liter dengan harga di bawah Rp10.000 lumayan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan lancar,” ujar Awaluddin. ★



# Tahun 2022, **Kuota BBM Nasional Turun**

Pada tahun 2022, kondisi ekonomi Indonesia diproyeksi mulai pulih seiring kecenderungan melandainya pandemi Covid-19. Meski begitu, kuota bahan bakar minyak (BBM) nasional di tahun 2022 justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021.

**B**adan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sendiri telah menetapkan besaran kuota BBM nasional untuk tahun 2022 sebesar 15,1 juta kiloliter (kl). Angka ini lebih rendah 4,43% dibandingkan kuota tahun 2021 yang sebesar 15,8 juta kl. Penurunan kuota Solar bersubsidi pada tahun depan ini, sesuai dengan kesepakatan bersama anggota DPR.

"Perlu kami sampaikan, untuk kuota BBM secara total nasional tahun 2022 turun. Dari 15,8 juta kiloliter pada tahun 2021 menjadi 15,1 juta kiloliter," ujar Komite BPH Migas Saleh Abdurahman usai melaksanakan peresmian empat lembaga penyalur BBM 1 Harga di Terminal BBM Pertamina Bitung, Selasa (14/12/2021).

### Telah menerima usulan kebutuhan Solar bersubsidi

Saleh Abdurahman meneruskan, untuk penyusunan kuota BBM tahun 2022, persoalannya tidak mudah. Untuk itulah, pihaknya akan mengatur kuota dengan baik agar fair dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.

Seiring dengan itu, BPH Migas masih menunggu usulan kuota BBM Solar bersubsidi dari seluruh provinsi dan mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebelum memutuskan. Sampai pertengahan Desember 2021, sebanyak 20 provinsi telah mengajukan kuota kebutuhan Solar bersubsidi untuk tahun 2022 kepada BPH Migas.

Pada kesempatan berbeda, Saleh Abdurahman mengaku saat ini pihaknya telah menerima usulan kebutuhan Solar bersubsidi yang merupakan jenis BBM tertentu (JBT) dari sejumlah provinsi. Namun, ia tidak memerinci berapa besar kuota yang diajukan. Hingga saat ini, BPH Migas masih menanti usulan tambahan dari provinsi lainnya.

"Sekitar 20 provinsi seingat saya dan kita masih nunggu sisanya," kata Saleh.

Yang pasti, menurut Saleh, semua usulan akan diatur sesuai dengan kuota JBT Solar 2022. Untuk tahun depan pihaknya akan memastikan pengawasan akan terus diperketat agar tidak melebihi kuota Solar 2022.

Saleh menilai, usulan kuota dari tiap provinsi ini terjadi lantaran meningkatnya pemulihan ekonomi pasca pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Jadi, kita terima dulu usulan-usulan dari daerah dan nanti kita akan lihat asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan dan pergerakan industri yang butuh Solar," ujarnya.

Adapun hingga November 2021, realisasi penyaluran harian dari solar bersubsidi yakni mencapai 40 ribu KL per hari. Sedangkan untuk BBM jenis premium justru mengalami tren penurunan. Bahkan penggunaan premium hingga November ini hanya sekitar 2% dari total penggunaan BBM nasional.

### Pembinaan tata kelola penyaluran BBM

Sebenarnya, pelonggaran PPKM turut mendorong sejumlah pemerintah daerah untuk mengajukan penambahan kuota BBM di wilayahnya pada tahun 2022. Salah satunya adalah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Selain penambahan kuota, Pemerintah Kabupaten Lingga berharap BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) juga melakukan pembinaan tata kelola penyaluran BBM di Lingga.

Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan hal tersebut, Bupati Lingga M. Nizar dan Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy mendatangi kantor BPH Migas, Rabu (27/10/2021) lalu. Dalam kesempatan ini, Nizar menyampaikan, besar harapan pihaknya agar ada penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Lingga tahun 2022.

"Bagian Perekonomian Setda Lingga juga memberikan informasi. Ada permasalahan

tata kelola penyaluran BBM di Lingga. Peralatan yang digunakan agen penyalur BBM tidak standar. Harapan kita, BPH Migas dan Pertamina bisa memastikan itu sebagai regulator dan pengawas," kata Nizar.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Lingga juga mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian BBM khusus Nelayan (SPBN). Hal ini dianggap vital karena mayoritas masyarakat Lingga bekerja sebagai nelayan. Kebutuhan BBM untuk nelayan ini per tahun sekitar 13 ribu kl.

Pemerintah Kabupaten Lingga juga sudah merekomendasikan dua calon penyalur baru untuk membuka SPBN tersebut yang berlokasi di Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir dan Desa Penuba di Kecamatan Selayar.

Direktur BBM Patuan Alfon S mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengelola BBM di daerahnya. Pada kesempatan ini, ia menilai alokasi BBM untuk Kabupaten Lingga tahun 2021 tidak ada masalah. Dari kuota BBM yang diberikan, untuk BBM jenis Solar, misalnya, yang terpakai per 10 Oktober 2021 baru sekitar 73%. Artinya, kata Alfon, stok masih sangat besar dan belum tentu habis hingga akhir Desember 2021.

"Kuota 2022 dasarnya pada realisasi 2021. Nah, untuk kuota BBM ini istilahnya pakai sistem 'pencet balon'. Kami tambahkan kuota ke Lingga, berarti harus mengurangi kuota ke daerah lain," kata Alfon.

Dijelaskan, selama ini Pemkab Lingga dan DPRD Lingga cukup intens berkoordinasi terkait pengelolaan BBM di daerahnya. Pihaknya selalu siap memberikan informasi dan berkoordinasi terkait masalah BBM di Lingga.

"Kami senang ada masukan dari bapak-bapak. Termasuk tentang kondisi tata kelola dan peralatan yang digunakan oleh agen penyalur BBM di sana. Ini jadi catatan kami untuk dilakukan pembenahan-pembenahan," ujar dia. ★

# Realisasi Distribusi BBM JBT & JBKP Tahun 2021, Cukup atau Over?

Akankan realisasi bahan bakar minyak (BBM) over kuota? Pertanyaan ini kerap muncul hampir setiap tahun, khususnya bila berbicara BBM bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu (JBT). Lantas, bagaimana realisasinya di tahun 2021?



## Kuota tidak jebol

Secara garis besar, kuota BBM pada tahun 2021 tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Pemerintah, melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk untuk penyediaan dan pendistribusian JBT. Jumlahnya sesuai kuota dalam APBN tahun 2021 adalah sebesar 16.300.000 kiloliter (kl).

Kuota JBT untuk PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga sebesar 16.080.040 kl, terdiri atas Minyak Solar sebesar 15.580.040 kl dan Minyak Tanah sebesar 500.000 kl.

Sementara itu, kuota JBT untuk PT AKR Corporindo Tbk berupa Minyak Solar sebesar 219.960 kl.

**Tabel** Kuota Volume Penugasan JBT Tahun 2021 per Badan Usaha Satuan kl

Jenis BBM Tertentu	Kuota Volume Penugasan	
	PT Pertamina (Persero)	PT AKR Corporindo, Tbk
Minyak Tanah	500,000	-
Minyak Solar	15,580,040	219,960
<b>TOTAL</b>	<b>16,080,040</b>	<b>219,960</b>

Realisasi penyaluran JBT periode semester II tahun 2021 sebesar 8.592.283 kl atau mengalami kenaikan sebesar 13,43% dari penyaluran pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 7.575.083 kl. Secara total selama tahun 2021, realisasi penyaluran JBT mencapai 16.105.129 kl (98,80% dari total kuota JBT). Perinciannya adalah Minyak Solar sebesar 15.616.588 kl (98,84%) dan Minyak Tanah sebesar 488.541 kl (97,71%).

Dibandingkan dengan volume realisasi penyaluran JBT tahun 2020, volume realisasi penyaluran JBT tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11,92%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 situasi pandemi Covid-19 berangsur-angsur membaik sehingga menyebabkan eskalasi pergerakan ekonomi dan kegiatan masyarakat.

Bagaimana dengan realisasi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP)? Pada tahun 2021, BPH Migas juga menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga sebagai Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian JBKP tahun 2021 dengan kuota sebesar 10.000.000 kl.

Realisasi volume penyaluran JBKP RON 88 (Premium) periode semester II tahun 2021 sebesar 1.039.519 kl atau mengalami penurunan 73,66% dari penyaluran pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 3.946.794 kl. Secara total, realisasi volume penyaluran JBKP RON 88 (Premium) pada tahun 2021 sebesar 3.415.395 kl (34,15% dari kuota JBKP).

Dari tabel di atas, terlihat penurunan yang signifikan terhadap konsumsi JBKP RON 88 (Premium) antara tahun 2020 dan 2021. Di satu sisi, hal ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang berkualitas lebih baik dibandingkan JBKP RON 88 (Premium).

Bergeser ke Jenis Bahan Bakar Umum (JBU). Realisasi volume penjualan JBU periode semester II tahun 2021 sebesar 25.662.941 kl (unverified) atau mengalami penurunan 0,30% dari penjualan pada periode yang sama tahun 2020 sebesar

**Tabel Realisasi Penyaluran JBT Periode Semester II Tahun 2020 dan 2021**

JBT	Tahun 2020 (kl)	Tahun 2021 (kl)	% Naik/Turun
Minyak Solar	7.334.892	8.346.352	13,79%
Minyak Tanah	240.191	245.931	2,39%
<b>Total</b>	<b>7.575.083</b>	<b>8.592.283</b>	<b>13,43%</b>

**Tabel Realisasi Penyaluran JBT Tahun 2020 dan Tahun 2021**

JBT	Tahun 2020 (kl)	Tahun 2021 (kl)	% Naik/Turun
Minyak Solar	14.006.942	15.616.588	11,49%
Minyak Tanah	475.359	488.541	2,77%
<b>Total</b>	<b>14.482.301</b>	<b>16.105.129</b>	<b>11,21%</b>

**Tabel Realisasi Penyaluran JBKP Periode Semester II Tahun 2020 dan 2021**

JBKP	Tahun 2020 (kl)	Tahun 2021 (kl)	% Naik/Turun
RON 88 (Premium)	3.946.794	1.039.519	73,66%

**Tabel Realisasi Penyaluran JBKP Tahun 2020 dan 2021**

JBKP	Tahun 2020 (kl)	Tahun 2021 (kl)	% Naik/Turun
RON 88 (Premium)	8.442.028	3.415.395	59,54%

**Tabel Realisasi Volume Penjualan JBU Periode Semester II Tahun 2020 dan 2021**

Jenis BBM	Tahun 2020 (kl)	Tahun 2021 (kl)	% Naik/Turun
JBU	49.324.384	25.662.941	0,30%

**Tabel Realisasi Volume Penjualan JBU Tahun 2020 dan 2021**

Jenis BBM	Tahun 2020 (kl)	Tahun 2021 (kl)	% Naik/Turun
JBU	49.324.384	53.419.216	8,30%

**Tabel Market Share Penjualan JBU Tahun 2020 dan 2021**

BADAN_USAHA	Tahun 2021
PT PERTAMINA (PERSERO) & PT PERTAMINA PATRA NIAGA	44.210.957
NON PERTAMINA	9.208.258
<b>TOTAL</b>	<b>53.419.216</b>

25.740.244 kl. Secara total, realisasi volume penjualan JBU pada tahun 2021 sebesar 53.419.216 kl (unverified) atau mengalami kenaikan sebesar 8,30% dibandingkan realisasi penjualan tahun 2020 sebesar 49.324.384 kl.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 market share penjualan JBU PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga menguasai 83% penjualan JBU di Indonesia, sedangkan Badan Usaha non pertamina menguasai 17% penjualan JBU.

### Pengalihan penugasan

Terkait JBT dan JBKP, pada tahun 2021, BPH Migas menyerahkan perubahan Surat Keputusan Penerima Penugasan PT Pertamina (Persero) kepada PT Pertamina Patra Niaga selaku Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT dan JBKP Tahun 2018 sampai dengan 2022.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, SK Perubahan didasarkan adanya reorganisasi Pertamina dan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 69/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Senada dengan Erika, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, upaya restrukturisasi memang membutuhkan perubahan regulasi yang menyangkut penugasan-penugasan dari Pemerintah.

Nicke menilai, pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP bakal lebih efektif dan efisien pasca pengalihan ke Pertamina Patra Niaga. Peralihannya, dengan langkah ini maka ada pemangkasan birokrasi yang dilakukan.

Dalam Perpres No. 69/2021, terdapat ketentuan Pasal 8A yang mengatur bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP kepada Badan Usaha melalui penunjukan langsung dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan.

Adapun penugasan ini mulai berlaku 1 September 2021. SK Kepala BPH Migas yang diserahkan adalah Nomor: 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2022 dan SK Kepala BPH Migas Nomor 61/

P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2022.

Meski sudah beralih ke Pertamina Patra Niaga, Erika menegaskan Pertamina harus tetap bertanggungjawab atas penugasan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP hingga tahun 2022.

Selain itu, Erika menuturkan, sejak diberlakukannya penugasan selama lima tahun ini, setiap tahun BPH Migas tetap memberikan kuota kepada Badan Usaha penugasan hingga ke penyalur.

PT Pertamina Patra Niaga sendiri 99,904% sahamnya dimiliki oleh Pertamina dan 0,096% oleh PT Pertamina Trans Kontinental. ★



# Optimalkan Layanan Publik Demi Pastikan Ketersediaan BBM Bagi Masyarakat

Pelayanan publik (**public service**) merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan publik yang diberikan aparatur Pemerintah (**birokrasi pemerintah**) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Jelas, pelayanan publik merupakan produk dari organisasi pemerintahan. Pelayanan publik tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak, dan melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi).

Singkatnya, organisasi pemerintahan harus memberikan pelayanan terbaik secara berkelanjutan kepada publik. Dengan pelayanan yang terus meningkat kualitasnya, kepercayaan masyarakat akan terbangun. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk Indonesia tentang peningkatan pelayanan publik.

Terkait dengan pelayanan publik, Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Harya Adityawarman mengatakan, BPH Migas akan lebih mengintensifkan dan mengoptimalkan pelayanan dan pendekatan langsung masyarakat dan stakeholder dalam bentuk pembinaan kepada Badan Usaha dan masyarakat melalui Focus Group Discussion; Hilir Migas Expo; supervisi pembangunan penyalur BBM 1 harga; pengawasan ke lapangan melalui verifikasi dan uji petik; sosialisasi tugas fungsi BPH Migas; regulasi/kebijakan bidang hilir migas; dan BPH Migas Goes To Campus.

“Melakukan pengawasan BBM dalam rangka monitoring distribusi BBM dan gas bumi dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru juga menjadi tugas BPH. Sebagai bentuk apresiasi kepada Badan Usaha dan stakeholder, BPH Migas memberikan penghargaan awarding BPH Migas. Hal ini dilakukan untuk mengintensifkan dan mengoptimalkan pelayanan dan pendekatan langsung ke masyarakat dan stakeholder,” jelasnya belum lama ini.

la meneruskan, BPH Migas berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa guna serta menjamin tersedianya BBM

untuk masyarakat dalam kondisi apapun, termasuk di masa pandemi seperti saat ini.

“Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, BPH Migas tetap melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat,” ujar pria yang biasa dipanggil Didit ini.

## Bersentuhan langsung dengan masyarakat

Tugas dan fungsi BPH Migas memang banyak yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan akses energi kepada seluruh masyarakat di tanah air.

Salah satu upaya untuk mewujudkan akses energi yang mudah, luas, dan murah itu adalah pembangunan Pertashop. BPH Migas pun turut mengawal ketersediaan Pertashop di berbagai daerah secara langsung.

Beberapa waktu lalu, misalnya, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman melakukan monitoring pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg dan pendistribusian BBM pada Pertashop di beberapa lokasi di Mataram,



Nusa Tenggara Barat. Sejumlah lokasi yang dikunjungi mereka antara lain Pangkalan LPG di Jalan Majapahit, Ampenan; Pangkalan LPG Jalan Kota Tua, Ampenan; dan Pertashop Jalan Lingsar, Narmada, Lombok Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPH Migas dan Komite berinteraksi langsung kepada masyarakat sekitar perihal ketersediaan stok dan harga jual BBM dan harga gas LPG. Saat mengunjungi Pertashop 5P.83302 di Narmada, diketahui

bahwa Pertashop ini sudah beroperasi selama 10 bulan, memiliki tangki dengan kapasitas 3 kiloliter (kl), 1 dispenser, 1 nozzle, produk penjualan Pertamina dengan harga Rp9.000,-/liter, dan rata-rata penjualannya 800–900 liter sehari.



Konsumen Pertashop tersebut adalah pengguna kendaraan bermotor.

Dalam kunjungan ke pangkalan LPG dan Pertashop, Kepala BPH Migas meminta PT Pertamina (Persero) agar menjaga ketersediaan BBM dan stok gas LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap pasokan LPG 3 kg ini selalu tersedia agar masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan untuk membelinya. Serta pertashop penyebarannya juga semakin luas sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan BBM, tidak perlu jauh jauh mencarinya," ujar Erika.

Di kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun meminta kepada BPH Migas dan Pertamina untuk mengoptimalkan pembangunan Pertashop di samping pembangunan penyalur BBM 1 harga.

Arifin Tasrif menjelaskan bahwa saat ini program Pertashop yang sedang dijalankan oleh Pertamina bisa masuk ke daerah pelosok.

"Saya rasa ini harus dipercepat, dengan nilai investasi per unit sebesar Rp200 juta, saya rasa Badan Usaha Milik Desa (BUMD) bisa merespon hal ini, memanfaatkan peluang ini, dan bisa menyiapkannya di tiap tiap desa," ucap Arifin setelah meresmikan tujuh Penyalur BBM 1 Harga di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/12/21).

Dengan tersedianya pasokan energi yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok. Dengan demikian, BPH Migas dan Pertamina diharapkan dapat mempromosikan program ini ke seluruh wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.

Investasi Pertashop dinilai dapat kembali dalam waktu singkat karena adanya jaminan keekonomian harga dari Pertamina. Selain itu, Pertashop juga dianggap sebagai langkah dalam mengurangi kelangkaan BBM.

Arifin menegaskan bahwa energi berfungsi sebagai penggerak ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menghindari terjadinya kelangkaan pasokan energi dengan meningkatkan kontribusi kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi BPH Migas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga tercermin pada masa krusial, seperti periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Seperti tahun-tahun sebelumnya, BPH Migas turut terlibat dalam Posko Hari Raya dan Tahun Baru selama periode tahun 2021. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPH Migas dalam menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI.

Kegiatan Posko Natal dan Tahun Baru tahun ini direncanakan berlangsung pada 20 Desember 2021–4 Januari 2022. Pelaksanaan posko dilakukan dengan metode on desk dan kunjungan lapangan.

Keterlibatan BPH Migas pada Posko Natal dan Tahun Baru tahun ini antara lain melakukan monitoring lapangan di wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan kebutuhan BBM. Kunjungan lapangan turut melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM maupun aparat penegak hukum. Pemantauan objek vital dilakukan pada terminal BBM, penyalur BBM (SPBU, SPBB dan lain-lain), pelabuhan penyeberangan, dan sarana penunjang penyaluran BBM (kios Pertamina rest area maupun kantong BBM).

Sejauh ini, pasokan BBM pada periode Nataru aman terkendali dan tidak terjadi lonjakan permintaan konsumsi BBM yang signifikan.

### Mengikuti perkembangan teknologi

Sebuah organisasi publik pun tak lepas dari yang namanya perubahan. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perkembangan teknologi, misalnya, menuntut organisasi publik untuk cepat beradaptasi mengikuti tren terkini.

Pemanfaatan teknologi berbasis digital makin meluas. Hal ini turut mendorong BPH Migas

untuk menerapkan berbagai layanannya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Dalam rangka tersedianya keakuratan data dan ketepatan informasi terkait penyediaan dan pendistribusian BBM yang mendukung tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengaturan pengawasan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa, BPH Migas mengembangkan aplikasi informasi SILVIA.

Seiring dengan pelaksanaan proses pekerjaan SILVIA 2.0 dan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPH Migas serta kemudahan Badan Usaha, adanya kebutuhan untuk suatu sistem aplikasi yang terintegrasi di lingkungan BPH Migas. Oleh karena itu, pekerjaan yang semula SILVIA 2.0 menjadi sistem aplikasi SILVIA BPH Migas 2.0 yang mencakup berbagai modul.

Saat ini, aplikasi SILVIA BPH Migas 2.0 sudah dapat digunakan untuk kegiatan verifikasi volume JBU dan volume gas bumi serta rekonsiliasi iuran PNPB Badan Usaha. Selain itu, aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Migas terkait perizinan hilir migas dan Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM.

SILVIA BPH Migas 2.0 merupakan langkah nyata BPH Migas dalam mengoptimalkan layanan publik. Saat ini, SILVIA BPH Migas 2.0, sedang dikembangkan menjadi SILVIA 3.0 dengan fitur yang lebih luas. Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh pengalaman layanan yang lebih memuaskan. ★

# Premium?

## Segera Dihapus



Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium terus bergulir. Angka konsumsi Premium yang makin menyusut dari tahun ke tahun turut memperkuat wacana tersebut.

**B**adan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini masih menanti aba-aba dari Pemerintah terkait rencana penghapusan BBM jenis Premium. Hal tersebut menyusul ramainya wacana penghapusan BBM beroktan rendah ini pada tahun 2022.

"Kami masih menunggu kebijakan Pemerintah. Pemerintah tentu akan mempertimbangkan semua hal dalam mengambil keputusan," kata Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, Kamis (23/12/2021).

### Permintaan jauh berkurang

Namun yang pasti, menurut dia, permintaan BBM jenis Premium telah jauh berkurang dalam beberapa waktu terakhir ini. Di beberapa daerah masyarakat mulai sadar dan beralih menggunakan BBM dengan RON 90 ke atas. Bahkan telah "Dry Premium" yang artinya di beberapa SPBU tidak lagi menyediakan Premium.

BPH Migas mencatat konsumsi BBM jenis Premium atau RON 88 dalam lima tahun terakhir ini terus menurun. Hingga Juli 2021, realisasi penyaluran BBM khusus penugasan ini baru mencapai 2,71 juta kiloliter (kl) atau 27,18% dari kuota tahun ini sebesar 10 juta kl.

Saleh menilai, penurunan konsumsi Premium lantaran kesadaran masyarakat akan isu lingkungan semakin tinggi. Kemudian, pemberian diskon melalui program langit biru PT Pertamina (Persero) yang memberikan harga khusus BBM Peralite juga turut berkontribusi.

"Kecenderungan masyarakat, terutama milenial, saat ini lebih sadar energi lingkungan. Apalagi, isu perubahan iklim dan net zero emission," ujarnya di kesempatan berbeda.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, banyak faktor yang menyebabkan konsumsi BBM Premium terus menurun. Selain keberpihakan terhadap lingkungan, penurunan penggunaan Premium terjadi bersamaan dengan turunnya harga minyak mentah dunia. Sehingga jika dilihat di SPBU, disparitas Premium dengan produk lain tidak terlalu tinggi. Sehingga masyarakat lebih memilih produk yang berkualitas lebih baik.

"Kemudian program langit biru, Peralite seharga Premium. Tentu orang pilih yang kualitas baik," katanya.

Meski demikian, Komaidi mengingatkan agar BPH Migas dapat mengantisipasi beberapa hal jika program seperti langit biru tidak ada lagi dan harga minyak dunia kembali naik. Pasalnya, berdasarkan analisisnya, ketika ekonomi pulih, maka masyarakat cenderung akan kembali memilih produk yang lebih murah.

"Ketika ekonomi pulih kembali, masyarakat akan kembali ke cost biaya yang lebih murah. Kalau disediakan Premium, saya takut masyarakat akan kembali memakainya lagi," kata dia.

Untuk itu, ia menyarankan agar Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dapat direvisi.

"Saya sarankan direvisi. Jamali tak diizinkan karena aktivitas di sana lebih tinggi daripada yang lain," ujarnya.

Adapun dalam aturan ini, BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 (Premium) wajib tersedia di SPBU wilayah Jawa, Madura dan Bali.

Pertamina sendiri memang tengah meninjau untuk mengalihkan penggunaan BBM beroktan rendah ke oktan yang lebih tinggi. Perusahaan pelat merah itu juga menargetkan bertambahnya persebaran jumlah outlet BBM ramah lingkungan.

### Bergulir sejak lama

Payung hukum yang menunjang penghapusan Premium sudah tersedia. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4 atau RON 91. Premium yang beroktan 88 dinilai



tak ramah lingkungan, di bawah batas ideal oktan 91.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan, Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Wilayah penugasan ini sebagaimana tertulis di Ayat 3 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meski demikian, menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi.

"Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian," bunyi Pasal 3 Ayat 4.

Yang jelas, wacana penghapusan BBM jenis Premium sebenarnya sudah muncul cukup lama, namun tak kunjung terealisasi. Wacana penghapusan Premium tercatat setidaknya sudah muncul sejak tahun 2014 lalu. Kala itu, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi merekomendasikan agar impor Premium RON 88 mesti segera dihentikan dalam waktu lima bulan. Kemudian, Tim menginginkan tidak ada lagi bensin Premium yang dijual di SPBU.

"Sesuai rekomendasi Tim, intinya Premium RON 88 itu dihapus, hilang, tidak lagi dijual di SPBU. Buat apa? Orang di market hanya ada RON 92 ke atas," tegas Ketua Tim yang sering

disebut Tim Pemberantasan Mafia Migas Faisal Basri medio 2014 silam.

### Ada dua alasan setidaknya Tim

Pemberantasan Mafia Migas itu ingin Premium dihapus. Dalam kesempatan terpisah, Anggota Tim Agung Wicaksono menyebut, pertama, neraca perdagangan Indonesia harus diperbaiki. Impor BBM yang tinggi, terutama bensin RON 88 harus mulai dikurangi.

"Indonesia defisit minyak sejak 2003, dan 10 tahun kemudian defisit perdagangan BBM dan minyak mentah itu terjadi. Pertumbuhan konsumsi tak bisa dikejar pertumbuhan produksi. Jadi penghapusan RON 88 sangat penting," jelasnya.

Alasan kedua, lanjut Agung, adalah impor bensin RON 88 yang sarat 'permainan'. 'Pemburu rente', ujarnya, memiliki kedekatan pada pengambil keputusan. Ini bisa menjadi distorsi.

Sejak saat itu, wacana penghapusan Premium pasang-surut. Beberapa kali muncul, namun kemudian hilang dari pembahasan.

Wacana penghapusan Premium ini kembali muncul di penghujung tahun 2021. Sejumlah tokoh pun mengamini rencana penghapusan Premium tersebut. Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, Peralite masih ada di tahun 2022. Berbeda nasib dengan Premium yang akan dihapus.

"Kalau baca RKAP 2022 iya (dihapus). Subsidi geser ke Peralite agar tidak jualan yang berbahaya kesehatan dan dari sisi produksi kilang sekarang modern, tidak proyeksi Premium," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan, berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BBM yang dijual minimum RON 91.

"Satu adalah ketentuan dari Ibu Menteri LHK pada 2017 ada ketentuan mengurangi karbon emisi. Maka, direkomendasikan agar BBM yang dijual itu adalah minimum (oktan) 91," kata Nicke. ★



# Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan di Tangki BBM

Salah satu tangki di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, milik PT Pertamina (Persero) kembali terbakar pada Sabtu malam (13/11/2021). Meski pasokan bahan bakar minyak (BBM) aman pascakebakaran tersebut, peningkatan keamanan dan keselamatan di tangki BBM perlu dilakukan.



**D**irektur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono menyebut pada saat kebakaran, tim di lapangan melaporkan bahwa tangki 36T102 berisi Peralite. Djoko mengumumkan kebakaran tangki di kilang RU IV Cilacap, Jawa Tengah, bisa dipadamkan secara total tepatnya pukul 7.45 WIB, Minggu (14/11/2021). Menurut Djoko, ada beberapa upaya yang dilakukan tim di lapangan untuk memadamkan api. Pertama, Pertamina menyekat tangki yang terbakar dengan tangki lainnya.

Kedua, mengendalikan fluida di tangki yang terbakar dengan memindahkannya ke tangki lain. Ketiga, melakukan cooling di tangki yang berada di sekitar tangki yang terbakar, yaitu tangki 36T101 dan 36T103. Keempat, melakukan offensive fire fighting di tangki terbakar.

### Evaluasi mendalam

Kebakaran tangki BBM pada 13 November lalu bukan insiden pertama kalinya di tahun 2021. Sebelum insiden pada Sabtu (13/11/2021) lalu, kebakaran tangki di Kilang Cilacap juga pernah terjadi pada Jumat malam (11/06/2021). Adapun tangki yang terbakar saat itu yaitu tangki penyimpanan benzene, produk petrokimia. Tak hanya itu, bahkan sebelumnya, pada Senin dini hari 29 Maret 2021 juga terjadi kebakaran di empat tangki BBM di Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat, yang juga dioperasikan Pertamina.

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menyayangkan peristiwa kebakaran tangki di Kilang Cilacap. Ia menegaskan, perlu ada evaluasi yang sangat mendalam terhadap prosedur keamanan, operasional, dan prosedur teknis lainnya di tangki minyak milik perusahaan BUMN itu.

"Terlalu sering kebakaran. Kami akan panggil Pertamina untuk mendapat penjelasan detail kebakaran ini. Apakah di kilang atau di bagian lain," ujar Andi Yuliani Paris belum lama ini.

Ia menambahkan, harus ada audit forensik terhadap kelayakan alat di seluruh tangka milik Pertamina sebagai upaya memitigasi agar tidak terulang kejadian untuk kesekian kalinya. Termasuk menanyakan apakah semua alat di kilang-kilang memang rawan terhadap petir.

Di tempat terpisah, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, "Kebakaran itu tidak hanya meludeskan tangki penyimpanan minyak, tetapi juga mengancam keselamatan warga di sekitar yang harus mengungsi".

Menurutnya, sistem pengamanan di kilang Pertamina harusnya sudah sesuai dengan

standar internasional. Namun, tetap saja terjadi kebakaran untuk kesekian kalinya.

Sementara itu, Mabes Polri telah menerjunkan tim dari Laboratorium Forensik (Labfor) dan Automatic Finger Print Identification System (Inafis) untuk melakukan olah TKP di lokasi kebakaran tangki di kilang minyak milik Pertamina yang berada di Cilacap.

"Ya menunggu hasil tim Labfor dan Inafis dulu untuk melaksanakan olah TKP bersama ahli," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Senin (15/11/2021).

Dedi menyampaikan Labfor dan Inafis Polri masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa para saksi. Hal tersebut diperlukan demi menentukan penyebab dari kebakaran Kilang Cilacap milik Pertamina itu.



"Untuk menentukan penyebabnya, tim sedang bekerja dulu untuk mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dan memeriksa para saksi," kata Dedi.

### Memastikan pasokan BBM aman

Sesaat setelah kebakaran tangki BBM di Kilang Cilacap pada 13 November 2021 lalu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera memantau kondisi langsung ke lokasi.

Berdasarkan tinjauan lapangan, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman memastikan stok Peralite hingga saat ini masih aman dan tidak terganggu akibat kebakaran ini. Dalam acara "Energy Corner" Squawkbox CNBC Indonesia, Senin (15/11/2021), dia mengatakan stok Peralite cukup tersedia dan ada di berbagai wilayah di Indonesia.

"Untuk Peralite ini dari sisi stok cukup tersedia, dan terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Ini adalah blending Premium dan Pertamina, sampai 11 November stok Peralite 321.196 kiloliter (kl) yang tersedia," ungkapnya.

Sementara stok Pertamina, imbuhnya, mencapai 719.565 kl. Meski terjadi insiden kebakaran tangki di Kilang Cilacap, namun menurutnya ini tidak berpengaruh pada keamanan pasokan BBM nasional, khususnya di Pulau Jawa.

"Secara umum peristiwa kebakaran di salah satu tangki di kilang Cilacap ini tak pengaruh pada keamanan BBM kita, khususnya di Pulau Jawa," jelasnya.

Atas kejadian kebakaran tangki yang kembali terulang di Kilang Cilacap ini, pihaknya mengaku prihatin. Diharapkan

kejadian ini tidak menghambat penyaluran BBM, khususnya Peralite di wilayah Jawa Tengah (Jateng).

"Pertama-tama tentu kita prihatin kejadian di salah satu tangki di RU IV di Cilacap yang berisi Peralite di tangki, tapi kita harap kejadian ini gak akan ganggu penyaluran BBM wilayah Jateng," lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, permintaan Peralite terus mengalami peningkatan pesat di tahun ini. Peningkatan permintaan ini menurutnya tidak jadi masalah karena Peralite merupakan produk BBM non subsidi.

"Yang jadi masalah adalah terkait Jenis BBM Tertentu (JBT) atau subsidi Solar, kalau ada gangguan di tangki-tangki penimbunannya," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution mengatakan bahwa stok BBM dan elpiji (LPG) masih aman setelah kebakaran kilang.

"Dari sisi ketersediaan stok BBM dan LPG dapat kami sampaikan bahwa stok BBM dan LPG nasional saat ini sangat baik," kata Alfian dalam konferensi pers, Minggu (14/11/2021).

Alfian menjelaskan jika saat ini stok Premium berada di posisi 27 hari, Pertamina 15 hari, Peralite di atas 10 hari, Solar 20 hari, Avtur 35 hari, serta Pertamina Turbo 50 hari, dan LPG 12,7 hari.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pendistribusian BBM dan LPG berlangsung seperti biasanya. Baik di daerah Jawa Tengah maupun sebagian Jawa Barat yang merupakan coverage dari kilang Cilacap," jelasnya. ★



## Akan Dibangun Jaringan Pipa Gas, Perwakilan BPH Migas Kunjungi JIPE di Gresik



Perwakilan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Gresik, Jawa Timur, Rabu (03/11/2021). Rencananya, pada kawasan JIPE akan dibangun fasilitas pelabuhan, jaringan pipa gas, dan pembangkit listrik.

JIPE merupakan salah satu kawasan industri berstandar internasional terintegrasi. Memiliki luas 3.000 hektar, kawasan ini akan menjadi hub industri yang paling strategis di Indonesia dan Asia Pasifik. Kawasan ini diresmikan oleh presiden Joko Widodo pada tahun 2018 lalu.

Selain pelabuhan, jaringan pipa gas, dan pembangkit listrik, di kawasan JIPE juga direncanakan akan dibangun smelter. Keberadaan smelter ini nantinya dapat memperkuat hilirisasi Industri di Indonesia. Perkiraan kebutuhan gas untuk pembangkit di kawasan ini pada tahun 2023–2025 adalah 3,75 mmscfd dan untuk tenant 33,75 mmscfd.

Di sela kunjungan ke JIPE, perwakilan BPH Migas juga mengunjungi SPBKB AKR 10.2.6.007 di Manyar dan TBBM AKR di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. ★

# Tingkatkan Kompetensi SDM Badan Usaha, BPH Migas Gelar Bimtek Bidang Gas Bumi

**B**adan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) c.q Direktorat Gas Bumi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek)/Workshop bagi Pegawai Badan Usaha Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi, Niaga Gas Bumi, dan Operator Jaringan Gas (Jargas). Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia dari Badan Usaha-Badan Usaha, khususnya pada kegiatan usaha gas bumi melalui pipa

Kegiatan ini berkeja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas Cepu. Bimtek tersebut diadakan di sejumlah kota, seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Cirebon. Periode pelatihan berlangsung sekitar satu bulan, yakni sejak 1 November–4 Desember 2021.

“Saya harap pelatihan ini akan sangat bermanfaat bagi Badan Usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen Badan Usaha dan masyarakat sebagai konsumen akhir gas bumi serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilaksanakan,” ujar Direktur Gas Bumi Sentot Harijadi pada pembukaan kegiatan.

Pada Bimtek ini, terdapat empat materi yang diajarkan. Keempatnya adalah Gas Management System, Gas Metering, Sertifikasi Teknisi Perawatan Mekanik, dan Sertifikasi Inspektur Pipa Penyalur. Sebanyak 39 Badan Usaha dengan 300 peserta mengikuti kegiatan ini. Para peserta terdiri dari Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi, Badan Usaha Niaga Gas Bumi, dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai Operator Jaringan Gas.

Imam Supriyadi yang bekerja di PT Kalimantan Jawa Gas yang senang sekali dengan pelatihan yang diberikan.

“Saya sangat berterima kasih kepada BPH Migas dan PPSDM Migas yang telah mengundang kami untuk mengikuti

pelatihan teknisi perawatan mekanik angkatan ketiga. Kami mendapatkan banyak sekali manfaat dalam pelatihan ini di mana kami mendapatkan pelatihan tentang pipa, pompa, kompresor, dan turbin juga beberapa mekanikal, termasuk pembuatan alat angkut dan safety K3 migas. Kami berharap, pelatihan ini dapat berlanjut di tahun depan karena ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami untuk menunjang kinerja kami di perusahaan” jelas

salah satu peserta bernama Imam Supriyadi yang bekerja di PT Kalimantan Jawa Gas.

Kegiatan pelatihan ini merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara BPH MIGAS dan PPSDM Migas Cepu pada tahun 2019. Cakupan MoU itu antara lain penyelenggaraan pelatihan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan sertifikasi keahlian. ★



# BPH Migas Pantau Kualitas Gas Bumi di 18 Titik Jawa Barat dan Jawa Timur

**B**adan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) c.q Direktorat Gas Bumi telah menyelesaikan monitoring sampel dan analisa komposisi kualitas gas bumi pada pipa pengangkutan gas bumi di 18 titik di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Pemantauan kualitas gas bumi ini bertujuan menyesuaikan spesifikasi gas bumi yang mengalir pada pipa pengangkutan gas bumi dengan Pengaturan Akses Pipa Pengangkutan Gas Bumi (Access Arrangement) yang telah ditetapkan oleh BPH Migas.

Monitoring 18 titik tersebut berlangsung selama 2,5 bulan, sejak 10 September–30 November 2021. Kegiatan ini berkerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”.

“Kegiatan ini adalah upaya BPH Migas agar Badan Usaha Transporter maupun Badan Usaha Shipper dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang

telah diatur sehingga bisnis kegiatan Badan Usaha dapat terlaksana secara legal dan baik serta sasaran peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat tercapai,” ujar Direktur Gas Bumi Sentot Harijady saat ditemui di kantornya, Kamis (18/11/2021).

Parameter dan analisa komposisi gas sampling adalah nilai kotor kalor (gross heating value), berat jenis (specific gravity), kandungan gas inert (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>), kandungan C<sub>3</sub>+, kandungan gas sulfur, kandungan uap air (water content), dan partikulat. Hasil dari kegiatan ini yaitu analisa laboratorium independen yang menunjukkan kualitas gas bumi sebagai bahan evaluasi lebih untuk mengetahui gas bumi yang diserahkan telah memenuhi spesifikasi sesuai Access Arrangement yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. ★



# Monitoring Fasilitas Pipa Gas Badan Usaha, BPH Migas Kunjungi Stasiun Metering Wunut Sidoarjo



**P**erwakilan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi fasilitas pipa gas bumi beserta pendukungnya milik PT Pertagas Niaga di Wunut, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (04/11/2021). Tujuan kunjungan untuk mengecek fasilitas yang dimiliki oleh Pertagas, seperti metering system, valve dan lainnya.

Kunjungan lapangan dilanjutkan ke fasilitas distribusi milik PT IKD. PT IKD melayani konsumen yang berada di wilayah tersebut melalui PT Pilar Daya Sinergi, PT Dharma Perkasa Gemilang, PT Dharma Perkasa Sejati, PT Para Amarta Gasindo, dan PT Indojoya Raya Sejahtera. Dengan kunjungan lapangan ini diharapkan tidak ada kendala pengaliran gas ke konsumen.

Pada pertengahan Agustus lalu, telah dilakukan pengaliran gas (gas in) secara parsial 1.070 Sambungan Rumah tangga (SR) di Sektor 01, Desa Kategan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Gas

in terhadap 1.070 SR ini merupakan bagian dari 11.418 SR yang dibangun dengan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2021.

Jumlah ini menambah 17.625 SR yang telah terbangun sebelumnya di Sidoarjo yang dimulai sejak 2010. ★



# Rancang Regulasi Nomor Registrasi Usaha (NRU) BBM, BPH Migas Gelar *Public Hearing*

**B**adan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan public hearing di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/11/2021). Public hearing ini diadakan guna membuat rancangan Peraturan tentang Nomor Registrasi Usaha (NRU) Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pada public hearing ini, BPH Migas mengundang para stakeholder, yaitu Badan Usaha Pengolahan BBM, Badan Usaha Pengangkutan BBM, Badan Usaha Penyimpanan BBM, Badan Usaha Niaga Umum BBM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Biro Hukum Kementerian ESDM, dan Bagian Hukum Migas.

Dalam acara tersebut, dibahas mengenai rancangan Peraturan BPH Migas tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak yang akan mengubah Peraturan BPH 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak. Peraturan baru tentang Nomor Registrasi Usaha akan

memangkas birokrasi penerbitan NRU. Nantinya, NRU akan otomatis terbit saat Badan Usaha mengajukan perizinan hilir migas dan disetujui. NRU dapat diakses melalui aplikasi berbasis web, yaitu Sistem Informasi Laporan, Verifikasi, dan Administrasi (SILVIA).

“Public hearing ini menjadi upaya BPH Migas untuk mengetahui pendapat stakeholder terkait peningkatan pelayanan kepada Badan Usaha, kemanfaatan kepemilikan NRU serta kecepatan waktu penerbitan produk regulasi untuk mendukung investasi di era industri 4.0,” ujar Direktur Bahan Bakar Minyak Patuan Alfion pada acara tersebut.

Perubahan mendasar yang terdapat dalam rancangan Peraturan BPH Migas tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak dibandingkan dengan Peraturan BPH 08/P/BPH Migas/X/2005 antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Registrasi Usaha didefinisikan berbunyi, “Nomor Registrasi Usaha

yang selanjutnya disingkat NRU adalah nomor kegiatan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang berfungsi sebagai regident (Registrasi dan Identifikasi) Pemegang Izin Usaha yang berisikan kode jenis izin, nomor registrasi, lokasi, dan masa berlaku;

2. NRU yang diterbitkan oleh Badan Pengatur berupa Sertifikat dan Quick Response Code (QR Code);
3. NRU diberikan hanya kepada setiap Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga yang selanjutnya disebut Pemegang NRU;
4. Pemegang NRU mendapatkan manfaat sebagai berikut:
  - Dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan usaha di antara Badan Usaha kepada Badan Pengatur;
  - Pemegang NRU pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga umum dapat mengajukan permohonan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha;
  - Pemegang NRU pada kegiatan usaha niaga umum BBM, dapat menjadi peserta lelang penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan (JBKP);
  - Pemegang NRU dapat mengajukan permohonan bantuan hukum untuk Keterangan Ahli dari Badan Pengatur;
  - Quick Response Code (QR Code) NRU dapat membantu memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada BPH Migas dan Badan Usaha, misalnya bila alat angkut milik Pemegang NRU mengalami kecelakaan dalam perjalanannya. ★





## Pastikan Stok BBM Aman Saat Nataru, Kepala BPH Migas Dampingi Menteri ESDM ke TBBM Padalarang

**K**epala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati turut mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengunjungi TBBM Padalarang, Jawa Barat, Jumat (24/12/2021). Kunjungan ini dalam rangka monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM pada masa hari raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru.

Dalam kegiatan tersebut, Arifin Tasrif menyampaikan, ketahanan stok saat ini untuk bahan bakar jenis Bensin, seperti Premium dapat bertahan hingga 23,33 hari; Pertalite 7,72 hari; Pertamax 21,75 hari; dan Pertamax Turbo 48,93 hari. Sedangkan untuk kendaraan berbahan bakar Diesel, seperti Solar/Bio dapat memenuhi stok selama 18,90 hari; Dexlite 1,68 hari; dan Dex 31,12 hari.

Pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Pemerintah memperkirakan adanya lonjakan permintaan BBM. Pertamina memproyeksikan terdapat kenaikan konsumsi BBM sebesar 1,9 juta kilo liter pada periode tersebut. Untuk itu, Pemerintah melakukan upaya untuk mengantisipasi kelangkaan BBM pada momen tersebut.

Tak lupa, Menteri ESDM berterima kasih kepada PT Pertamina (Persero) yang



telah menjaga suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) pada masa Nataru ini tercukupi dan relatif aman di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mengapresiasi upaya Pertamina atas dedikasinya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru.

Titik rawan kemacetan area yang dilayani Satgas Nataru Jawa bagian barat antara lain wilayah Anyer, Merak, Cikampek, Nagrek,

Cirebon, Garut dan daerah wisata Puncak, Lembang, Ciwidey, Pangandaran serta Pelabuhan Ratu.

Sebelumnya, pada Sabtu (11/12/2021), Erika Retnowati beserta jajarannya melakukan kunjungan lapangan ke RU VI Balongan Pertamina, Indramayu, Jawa Barat. Kunjungan ini juga untuk memastikan persiapan pasokan BBM saat Nataru, khususnya untuk wilayah Jawa bagian Barat. ★

# Apresiasi Stakeholder Hilir Migas, BPH Migas Gelar BPH Award 2021

ONESIA



**B**adan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar Penghargaan BPH Award 2021, Senin (20/12/2021). Penghargaan ini merupakan apresiasi BPH Migas kepada pihak-pihak yang telah mendukung kebijakan di sektor hilir migas.

Pihak-pihak yang dimaksud adalah Badan Usaha dan pemerintah daerah maupun perseorangan. Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang hadir secara virtual berharap, para penerima penghargaan semakin aktif mendukung pelaksanaan kegiatan hilir migas di masyarakat guna mewujudkan pemerataan akses energi ke masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat kepada para penerima Penghargaan BPH Award 2021. Prestasi dan sumbangsih tanpa pamrih yang telah diberikan saudara bermakna besar bagi

kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Menteri ESDM.

Harapan yang sama pun diungkapkan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati. Dengan penghargaan ini, baik Badan Usaha bidang BBM maupun Badan Usaha bidang gas bumi serta pemerintah daerah memberikan kontribusi terbaik dalam mendistribusikan dan mengawasi ketersediaan energi di masing-masing wilayahnya.

"Kami mengucapkan selamat tentunya kepada para pemenang penghargaan pada malam ini dan juga terima kasih atas kerja samanya yang sangat baik. Terima kasih atas kontribusinya bapak dan ibu sekalian dalam menyediakan dan pendistribusian BBM dan gas melalui pipa diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI). Semoga capaian yang telah bapak-ibu raih akan terus dipertahankan dan juga dapat memberikan motivasi, tentunya kepada Badan Usaha lainnya untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga bisa memperoleh penghargaan di masa yang akan datang," ujar Erika.

Pada tahun 2021, terdapat 12 kategori dengan 34 penerima penghargaan. Berikut para penerima Penghargaan BPH Migas Award 2021:

1. Kategori Badan Usaha Pelaksana Utama Program BBM 1 Harga
  - PT Pertamina (Persero)
2. Kategori Penyalur BBM 1 Harga (Realisasi Penyaluran Terbesar (JBKP + JBT)
  - Wilayah Barat, yaitu SPBU 65.794001 Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh
  - Wilayah Tengah, yaitu SPBU 74.94801 Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Kecamatan Banggai Tengah
  - Wilayah Timur, yakni SPBU 86.97610 Maluku, Kepulauan Aru, Kecamatan Pulau-Pulau Aru
3. Kategori Badan Usaha Terpatuh Bidang BBM
  - PT Exxonmobil Lubricant Indonesia
  - PT Energi Coal Prima
  - PT Mandiri Kita Sukses
4. Kategori Badan Usaha Terpatuh Bidang Gas Bumi
  - PT Transportasi Gas Indonesia
  - PT Surya Energi Parahita
  - PT Sumber Petrindo Perkasa
5. Kategori Badan Usaha Niaga BBM dengan Penjualan Pembayaran luran Terbesar
  - PT Pertamina (Persero)
  - PT Pertamina Patra Niaga
  - PT AKR Corporindo
6. Kategori Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dengan Pembayaran luran Terbesar
  - PT PGN Tbk
  - PT Energasindo Heksa Karya
  - PT Sumber Petrindo Perkasa
7. Kategori Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan Pembayaran luran Terbesar
  - PT Pertamina Gas
  - PT Transportasi Gas Indonesia
  - PT Kalimantan Jawa Gas
8. Kategori Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Volume Terbesar
  - PT PGN. Tbk
- PT Sumber Petrindo Perkasa
- PT Energasindo Heksa Karya
9. Kategori Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Volume Terbesar
  - PT Pertamina Gas
  - PT Transportasi Gas Indonesia
  - PT PGN Tbk
10. Kategori Pemerintah Daerah yang mendukung Program BBM 1 Harga
  - Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur
  - Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
  - Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara
11. Kategori Penghargaan Sub Penyalur
  - Ponpes Darusalam, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
  - PT Rindi, Kab Ogan Ilir, Sumatera Selatan
  - Rudy (PO Sinar Bahagia), Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
12. Kategori Konsumen Pengguna JBT Terbaik
  - TW 1 Kapal Penumpang PT PELNI (Persero)
  - TW 2 Kapal Penumpang Swasta, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
  - TW 3 Kapal Penyeberangan Asosiasi GAPASDAP. ★





## Komite BPH Migas Resmikan BBM 1 Harga di Sejumlah Wilayah

**K**omite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turut meresmikan titik-titik penyalur Program BBM 1 Harga di beberapa wilayah. Peresmian BBM 1 Harga di sejumlah wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ini berarti memperbanyak masyarakat yang menikmati BBM dengan harga sama di daerah-daerah lain. Dengan begitu, turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga di daerah terpencil.

Salah satu titik peresmian yang dimaksud diadakan serentak di wilayah Sumatera. Komite BPH Migas Harya Adityawarman turut meresmikan Program BBM 1 Harga di wilayah tersebut yang secara simbolis dilakukan di TBBM Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (16/12/21). Secara daring (video conference) peresmian ini juga digelar di Kabupaten Aceh Singkil, Nias Utara, Lampung Barat, dan Bengkulu Utara.

Pada hari yang sama, Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Yapit Sapta Putra meresmikan Penyalur BBM 1 Harga di Terminal BBM Wayame, Ambon, Maluku. Untuk wilayah Ambon, Maluku, dan Papua diresmikan secara serentak sembilan titik Penyalur BBM 1 Harga. Kesembilan titik itu ialah di wilayah Kecamatan Pulau Babar (Kabupaten Maluku Barat Daya); Kecamatan Taniwel (Kabupaten Seram Bagian Barat); Kecamatan Kayoa,

Kecamatan Mandioli Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Joronga (Kabupaten Halmahera Selatan); Kecamatan Weda Timur (Kabupaten Halmahera Tengah); Kecamatan Aifat (Kabupaten Maybrat); Kecamatan Salawati Tengah serta Waigeo Utara (Kabupaten Raja Ampat).

Dua hari sebelumnya atau Selasa (14/12/2021), Komite BPH Migas Abdul Halim dan Eman Salman Arief meresmikan Penyalur BBM 1 Harga di Terminal BBM Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun di Kalimantan Selatan terdapat tujuh titik SPBU BBM 1 Harga yang diresmikan. Ketujuh titik itu yaitu SPBU 66.71202 Telaga Langsung, SPBU 66.73804 Teweh Selatan, SPBU 66.77508 Malinau Selatan Hilir, SPBU 66.77511 Malinau Selatan, SPBU 66.77512 Malinau Selatan Hulu, SPBU 66.79402 Tekarang, dan SPBU 66.78810 Marau.

Masih di hari yang sama, Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman turut meresmikan beroperasinya BBM 1 Harga di TBBM Bitung, Sulawesi Utara. Pada kesempatan itu, sebanyak empat lokasi yang diresmikan, yaitu SPBU 76.93318 Wawoni Tenggara, SPBU 76.94808 Banggai Utara, SPBU 76.94809 Bulagi Selatan, dan SPBU 76.95813 Siau Timur Selatan.

Kemudian, juga di hari yang sama, Komite BPH Migas Wahyudi Anas meresmikan Penyalur BBM 1 Harga SPBU 76.962.21 yang berada di Sumalata, Gorontalo Utara, Gorontalo. Peresmian di Gorontalo ini merupakan bagian dari lima titik lokasi SPBU BBM 1 Harga di Sulawesi dan Gorontalo. Kelima titik yang dimaksud adalah:

1. SPBU 76.95813 Kecamatan Siau Timur Selatan, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara
2. SPBU 76.93318 Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara
3. SPBU 76.94809 Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
4. SPBU 76.94808 Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
5. SPBU 76.96221 Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo. ★



# BPH Migas-KAI Tingkatkan Koordinasi



**K**epala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati bertemu dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo, Jumat (10/12/2021). Pertemuan ini berlangsung di Kereta Api Inspeksi 3 (KAIS 3) dalam perjalanan Jakarta–Cirebon.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi berbagai aspek, seperti optimalisasi pemenuhan kuota bahan bakar

minyak (BBM) bersubsidi KAI agar tepat sasaran dan tepat volume.

Erika Retnowati berharap kegiatan ini menjadi momentum awal yang baik bagi KAI dan BPH Migas agar ke depan bersama-sama mendapatkan hal yang positif.

Sementara itu, Didiek menyampaikan, “Dengan semakin erat hubungan antara KAI dan BPH Migas, diharapkan kita bersama-sama bisa memberikan nilai yang lebih untuk

Indonesia melalui amanah kita masing-masing”.

Kehadiran kuota BBM bersubsidi bagi transportasi massal, seperti kereta api, sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan kereta api merupakan angkutan massal dengan banyak keunggulan, seperti hemat energi, ramah lingkungan, mengurangi beban jalan raya, tingkat keselamatan tinggi, bebas pungutan liar, dan jadwal yang tepat waktu. ★



# BPH Migas Tindak Lanjut Usulan Alokasi BBM JBT Minyak Solar di Pelabuhan Kayangan

**K**omite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman bersama dengan Tim BPH Migas mengunjungi Pelabuhan Kayangan, Nusa Tenggara Barat, Kamis (02/12/2021).

Kunjungan ini dalam rangka verifikasi lapangan sebagai tindak lanjut atas usulan pengalokasian BBM JBT Minyak Solar untuk Kapal KMP Surya Kayangan yang akan

melayani masyarakat konsumen pengguna angkutan umum kapal penyeberangan trayek Pelabuhan Kayangan-Pototano. Verifikasi lapangan ini dibutuhkan dalam menentukan tarif kapal penyeberangan yang terjangkau sehingga mendorong perekonomian di Nusa Tenggara Barat.

Sebelumnya, tarif penyeberangan Kayangan-Pototano sempat direncanakan naik per tanggal 1 Januari 2022. Namun, rencana

kenaikan tarif tersebut ditunda. Penundaan kenaikan ini diumumkan di penghujung tahun 2021.

Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Transportasi laut yang tersedia berupa kapal feri yang beroperasi selama 24 jam dengan durasi dua jam perjalanan menuju Pelabuhan Poto Tano Sumbawa. ★



# BPH Migas Raih Penghargaan JDIHN Terbaik IV



**Selamat kepada BPH Migas!**  
mendapatkan penghargaan sebagai **Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik IV Tahun 2021 Kategori Lembaga Nonstruktural**

**B**adan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meraih penghargaan "Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik IV Tahun 2021 Kategori Lembaga Nonstruktural". Penyerahan penghargaan JDIHN 2021 berlangsung di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (02/12/21).

Penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.HN.03.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik

tahun 2021. Penghargaan ini berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia mengenai kegiatan pengelolaan JDIH yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai standar yang telah ditetapkan, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu pengisian e-reporting juga menjadi faktor penting dalam penilaian tersebut.

Dengan adanya JDIHN Award ini, diharapkan para anggota JDIH mampu meningkatkan

kinerja dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat serta mudah diakses secara cepat. Di samping itu, manfaat dari terbentuknya JDIH adalah mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dengan anggota jaringan serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan memberi pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketaatan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. ★



Keluarga Besar  
Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi  
Mengucapkan

# SELAMAT TAHUN BARU

# 2022





**Badan Pengatur Hilir Migas**  
**Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak**  
**Hingga ke Pelosok Negeri...**

## Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

## Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  
[www.bphmigas.go.id](http://www.bphmigas.go.id)